



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844). Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah akan terwujud apabila dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan .

Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD



terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyiapkan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4219) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peratutan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
13. Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah kepada Pemerintah , Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



27. Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2013 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2013 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II** Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menjelaskan tentang Ekonomi Makro , Kebijakan Keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan,yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah , basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.



Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas.

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kabupaten Batang yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 14 Juli 1965 berada pada jalur utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas Daerah Kabupaten Batang adalah 78.864,16 Ha dan mempunyai batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaen Banjarnegara
- c. Sebelah barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal

Sebagai daerah agraris dimana sektor pertanian dan perkebunan merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, luas pemanfaatan lahan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah : 22.411,08 Ha
- b. Tanah Perkebunan : 7.909,11 Ha
- c. Tegal/Huma : 19.250,75 Ha
- d. Padang Rumput : 89,95 Ha

Potensi tanaman di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis dan cabai. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

Potensi perikanan Kabupaten Batang dapat dilihat dari letak geografis di tepi pantai Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil



merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429, 2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).

2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Menurut harga berlaku, pada tahun 2012 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 27,46%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 26,02%. Kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor perdagangan sebesar 16,19%. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,11%.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur atau menilai indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedang besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor yang terdapat di daerah tersebut.

Perkembangan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita terbesar lima tahun



terakhir terjadi pada tahun 2010 sebesar 11,87 %. Sedangkan berdasarkan harga konstan kenaikan pendapatan perkapita tertinggi lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 sebesar 4,88%.

Tabel II.1. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang
Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan perkapita adh berlaku (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pendapatan perkapita adh konstan 2000 (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	5.408.811	11,59	2.678.028	3,08
2009	5.813.081	7,47	2.792.054	3,64
2010	6.503.164	11,87	2.917.243	4,98
2011	7.213.164	10,92	3.059.693	4,88
2012	7.896.815	9,48	3.182.878	4,03

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Nilai PDRB Per kapita Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2008 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp5,40 juta, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai Rp 7,89 juta. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, Ternyata dari nilai PDRB per kapita sejak tahun 2008 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp2.67 juta menjadi Rp3.18 juta, di tahun 2012.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produk domestik yang mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Andil terhadap pertumbuhan



ekonomi dapat diamati secara sektoral, spasial, dan penggunaan nilai tambah, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan pada sektor, wilayah atau komponen penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2012 mencapai 5,02 persen, menurun sekitar 0,24 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang sebesar 5,26 persen.

Tabel II.2.Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang 2008-2012 (%)

Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	4.56	2.78	2.95	2.38	1.62
2. Pertambangan & Penggalian	2.07	4.49	4.4	3.51	5.28
3. Industri Pengolahan	2.24	2.19	4.83	5.72	4.71
4. Listrik, Gas dan Air bersih	3.97	3.68	5.87	2.96	5.59
5. Bangunan	4.72	4.36	4.04	3.92	5.64
6. Perdagangan,Hotel dan Restoran	2.68	4.46	5.33	5.89	7.36
7. Angkutan dan Telekomunikasi	2.88	6.29	7.16	7.25	5.83
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	5.95	4.05	5.56	6.69	7.79
9. Jasa-jasa	5.57	6.97	8.63	9.17	7.74
PDRB	3.67	3.72	4.97	5.26	5.02

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Andil sektoral yang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2012 disumbang oleh sektor Keuangan, sewa dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 7,79 persen. Pada posisi berikutnya, oleh sektor angkutan jasa-jasa dan perdagangan, hotel, RM yang masing-masing mempunyai pertumbuhan sebesar 7,74 persen dan 7,76 persen.

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang cukup penting. Laju inflasi Kabupaten Batang pada tahun 2012 3,83 persen lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 sebesar 3,01 persen.



Untuk tahun 2012 ini inflasi tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 7,40 % disusul sektor pertanian sebesar 5,39 %. Rata-rata inflasi menurut harga produsen tahun 2012 sebesar 5,41 %.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Batang dengan DPRD Kabupaten Batang. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2013.

Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah masih tetap mengoptimalkan peningkatan penerimaan PAD serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

Dalam merencanakan target pendapatan daerah supaya memperhatikan perubahan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan kondisi makro ekonomi baik daerah maupun nasional, setelah berlakunya *close list system* dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang no. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahan PBB menjadi pajak daerah perlu dilakukan penyesuaian dari perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dampak krisis ekonomi global yang kemungkinan masih berlangsung dalam tahun anggaran 2013, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pada penerimaan PAD di daerah.



Untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada :

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antar dinas terkait;
- c. Penataan performance budget melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang efisien, efektif dan berkesinambungan;
- d. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik dan memberikan hasil yang baik dan biaya rendah.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal :

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi
 - Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak / retribusi yang ada, proses ini meliputi :
 - Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi;
 - Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi;
 - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah;



- Penataan system dan organisasi serta peningkatan kualitas SDM perencana dan pelaksana pemungut retribusi dan pajak daerah.
 - Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi . Proses ini meliputi :
 - Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - Pengkajian penerapan jenis retribusi baru;
 - Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB dan BPHTB yang didaerahkan;
 - Menyempurnakan peraturan di bidang pajak dan retribusi daerah, sebagai tindak lanjut regulasi baru
 - Peningkatan manajemen kualitas data dan ketepatan laporan serta pengadministrasian anggaran sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas penarikan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
2. Kebijakan Dana Perimbangan

Mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak bulan Juni 2012 sedangkan penetapan alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013 direncanakan sekitar bulan Oktober 2012, maka pencantuman alokasi dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 didasarkan pada alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir (Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010).

Dalam rangka pencapaian target Pendapatan di bidang Dana Perimbangan, maka strategi dan prioritas yang dilakuka antara lain :



- a) Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pelayanan publik;
 - b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil pajak untuk mendukung pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan daerah
3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Batang dalam menetapkan pendapatan bagi hasil dari provinsi pada tahun anggaran 2013 menggunakan pagu anggaran tahun 2012. Sedangkan bagian pemerintah Kabupaten Batang yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target akhir tahun anggaran 2012 ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 TENTANG Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Batang. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- 1.1 Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.



- 1.2 Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 1.3 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya . Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan okeh setiap SKPD harus *SMART-C* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound and Continously improve*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 1.4 Belanja disusun secara produktif, efisien dan berkualitas dan berdasarkan pada perhitungan yang rasional, sesuai tahapan untuk mencapai sasaran.
- 1.5 Mempertajam skala prioritas.
- 1.6 Mengembangkan daya antisipatif terhadap kegiatan baru yang mungkin muncul berdasarkan regulasi baru.
- 1.7 Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
 - Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasian untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.



- Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum'
 - Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga.
- 2.1 Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD diperhitungkan access yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- 2.2 Belanja pegawai untuk gaji PNS direncanakan sesuai dengan kebutuhan belanja gaji selama 13 bulan, ditambah dengan rencana kenaikan gaji sebesar 5%, accres 1,5 % dan penerimaan CPNS.
- 2.3 Belanja pegawai di luar belanja gaji, tetap direncanakan untuk anggaran tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja/tempat bertugas/kondisi kerja/kelangkaan profesi /prestasi kerja maupun pemberian tunjangan kesejahteraan khusus, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing SKPD.
- 2.4 Belanja bunga dipergunakan untuk membayar kewajiban membayar bunga kepada PT Bank Jateg dan kepada Pemerintah Pusat
- 2.5 Belanja subsidi tidak direncanakan anggarannya;
- 2.6 Belanja Hibah dan Bantuan sosial. Belanja Hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh



pemerintah, Pemerinah Daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sedangkan untuk menjalankan fungsi pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu Pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

- 2.7 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinah Desa direncanakan hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa;
- 2.8 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Alokasi Dana Desa;
- 2.9 Belanja Tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan dan ketertiban daerah dan tidak diharapkan berulang ;

2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan direncanakan berasal dari penerimaan pinjaman, SILPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.



2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

2.4 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 disajikan secara ringkas sebagai berikut :

APBD Tahun 2013			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.048.162.370.729,00	1.086.627.383.076,00	38.465.012.347,00
Belanja dan Transfer	1.175.197.081.090,00	1.067.412.675.201,00	107.784.405.889,00
Surplus/(Defisit)	(127.034.710.361,00)	19.214.707.875,00	146.249.418.236,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	132.531.957.261,00	132.532.413.822,00	456.561,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.497.246.900,00	5.053.462.944,00	443.783.956,00
Pembiayaan Netto	127.034.710.361,00	127.478.950.878,00	444.240.517,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	146.693.658.753,00	146.693.658.753,00

Dari data di atas, realisasi pendapatan melampaui target 3,67% yaitu sebesar Rp34.595.580.742,00 dan Belanja yang tidak terserap 9,17% yaitu sebesar Rp.107.727.453.573,00

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah dapat kami sajikan tersendiri dalam bentuk buku matrik sebagai hasil kompilasi pencapaian kinerja keuangan SKPD se Kabupaten Batang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013. Dalam CALK ini akan kami sajikan ringkasan pencapaian kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai urusan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diringkas dari Laporan Keterangan



Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013. Target Kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Batang disajikan dalam Buku LKPJ Bupati Tahun 2013.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013

Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2013 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp 1.086.627.383.076,00 lebih besar Rp.36.465.012.347,00 yaitu 3,67% dibandingkan dengan target sebesar Rp.1.048.162.370.729,00
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.067.412.675.201,00 lebih rendah Rp107.784.405.889 atau 9,17 % dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp1.175.197.081.090,00
3. Pada realisasi APBD tahun anggaran 2013 terjadi surplus sebesar Rp19.214.707.875,00. Sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 127.478.950.878,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2013 sebesar Rp.146.693.658.753,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.048.162.370.729,00	1.086.627.383.076,00	38.465.012.347,00
Belanja dan Transfer	1.175.197.081.090,00	1.067.412.675.201,00	107.784.405.889,00
Surplus/(Defisit)	(127.034.710.361,00)	19.214.707.875,00	146.249.418.236,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	132.531.957.261,00	132.532.413.822,00	456.561,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.497.246.900,00	5.053.462.944,00	443.783.956,00
Pembiayaan Netto	127.034.710.361,00	127.478.950.878,00	444.240.517,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	146.693.658.753,00	146.693.658.753,00



Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SILPA tahun anggaran 2013 berasal dari *over target* pendapatan sebesar Rp38.465.012.347,00 atau 3,67%; sisa anggaran belanja sebesar Rp107.784.405.889,00 atau 9,17%; dan dari surplus pembiayaan netto sebesar Rp444.240.517,00 atau 0,35% .

Rekapitulasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2013 beserta realisasinya untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b.

Sebagaimana disajikan pada lampiran tersebut, terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran pendapatan. Beberapa SKPD tersebut dinas dan badan yang bukan merupakan penghasil pendapatan, antara lain Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas dan badan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pendapatan melalui SKPD tersebut yang berasal dari Lain-lain PAD Yang Sah, diantaranya berasal dari pendapatan pengembalian belanja tahun lalu, dan pendapatan jasa giro pemegang kas.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2012 Dibandingkan dengan Tahun 2013

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, pendapatan tahun 2013 meningkat Rp152.683.726.366,00 atau 16,35%. Belanja tahun 2013 meningkat sebesar Rp167.207.641.836,00 atau 18,58%. Pembiayaan netto meningkat Rp167.207.641.836,00 atau 29,04%. Sedangkan SILPA meningkat Rp4.161.701.492,00 atau 10,69% dengan perhitungannya sebagai berikut :



	Realisasi		Realisasi 2013-Realisasi 2012	
	2013(Rp)	2012 (Rp)	Rp	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	1.086.627.383.076,00	933.943.656.710,00	152.683.726.366,00	16,35
Belanja dan Transfer	1.067.412.675.201,00	900.205.033.365,00	167.207.641.836,00	18,57
Surplus/(Defisit)	19.214.707.875,00	33.738.623.345,00	(14.523.915.470,00)	(43,05)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	132.532.413.822,00	106.757.242.134,00	25.775.171.688,00	24,14
Pengeluaran Pembiayaan	5.053.462.944,00	7.963.908.218,00	(2.910.445.274,00)	(36,55)
Pembiayaan Netto	127.478.950.878,00	98.793.333.916,00	28.685.616.962,00	29,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	146.693.658.753,00	132.531.957.261,00	14.161.701.492,00	10,69

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun upaya optimalisasi belanja daerah antara lain sebagai berikut:

A. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Pendapatan Daerah

Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pada kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi pendapatan melebihi yang ditargetkan. Sedangkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, realisasi pendapatan di bawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pendapatan pada kelompok PAD, terjadi pada pos retribusi pelayanan kesehatan.

Adapun Hambatan dan permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya SDM naik kualitas maupun kuantitas dalam menangani pemungutan pajak
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban-kewajibannya



- Tidak ada/ belum ada pelayanan khusus penyetoran PBB (masih digabung dengan pelayanan lainnya)
- Tempat pelayanan PBB dari 15 Kecamatan, baru ada 8 Tempat Pelayanan.
- Kesulitan penagihan PBB tanah mrancang karena Wajib Pajak di luar kota alamatnya tidak jelas dan tidak ada nomor telpon/HP yang bisa dihubungi.

B. Hambatan dan Permasalahan Utama dalam Belanja Daerah

Realisasi belanja tahun 2013 mencapai 90,83 %. Untuk belanja langsung, yakni untuk belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan, realisasi mencapai 72,91 %.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya :

- Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II (dua) atau di triwulan III (tiga)
- Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya
- Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD di antara pelaku yang terkait kegiatan, pengeola keuangan dan pengelola barang di SKPD
- Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang
- Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintahan Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang Nomor 19 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang. Kedua Peraturan tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Batang atau suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Batang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

Tabel 4.1

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013

No.	Kode	SKPD
1.	1.01.1.0	Dinas Pendidikan, Pendidikan, Pemuda dan olah Raga
2.	1.02.1.1	Dinas Kesehatan
3.	1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD dan BLUD)
4.	1.03.01.01	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5.	1.05.1.1	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral
6.	1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



7.	1.07.1.1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8.	1.08.1.1	Badan Lingkungan Hidup
9.	1.10.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	1.12.1.1	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11.	1.13.1.1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.	1.16.1.1	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
13.	1.19.1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	1.19.2.1	Satuan Polisi Pamong Praja
15.	1.20.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16.	1.20.2.1	Bupati dan Wakil Bupati
17.	1.20.3.1	Bagian Pemerintahan Desa
18.	1.20.3.2	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
19.	1.20.3.3	Bagian Hukum
20.	1.20.3.4	Bagian Pengendalian Pembangunan
21.	1.20.3.5	Bagian Kesejahteraan Rakyat
22.	1.20.3.6	Bagian Perekonomian
23.	1.20.3.7	Bagian organisasi
24.	1.20.3.8	Bagian Umum
25.	1.20.3.9	Bagian Tata Pemerintahan
26.	1.20.4.1	Sekretariat DPRD
27.	1.20.5.1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	1.20.6.1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
29.	1.20.7.1	Inspektorat
30.	1.20.8.1	Badan Kepegawaian Daerah
31.	1.20.14.1	Kecamatan Batang
32.	1.20.15.1	Kecamatan Tulis
33.	1.20.16.1	Kecamatan Subah
34.	1.20.17.1	Kecamatan Gringsing
35.	1.20.18.1	Kecamatan Limpung
36.	1.20.19.1	Kecamatan Tersono



37.	1.20.20.1	Kecamatan Reban
38.	1.20.21.1	Kecamatan Bawang
39.	1.20.22.1	Kecamatan Bandar
40.	1.20.23.1	Kecamatan Blado
41.	1.20.24.1	Kecamatan Wonotunggal
42.	1.20.25.1	Kecamatan Warungasem
43.	1.20.26.1	Kecamatan Kandeman
44.	1.20.27.1	Kecamatan Pecalungan
45.	1.20.28.1	Kecamatan Banyuputih
46.	1.20.29.1	Kelurahan Proyonanggan Selatan
47.	1.20.30.1	Kelurahan Proyonanggan Tengah
48.	1.20.31.1	Kelurahan Proyonanggan Utara
49.	1.20.32.1	Kelurahan Kauman
50.	1.20.33.1	Kelurahan Watesalit
51.	1.20.34.1	Kelurahan Sambong
52.	1.20.35.1	Kelurahan Kasepuhan
53.	1.20.36.1	Kelurahan Karangasem Utara
54.	1.20.37.1	Kelurahan Karangasem Selatan
55.	1.21.1.1	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
56.	1.22.1.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
57.	1.26.1.1	Kantor Perpustakaan dan Arsip
58.	2.01.1.1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
59.	2.02.1.1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
60.	2.04.1.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
61.	2.05.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
62.	2.07.1.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Sistem akuntansi keuangan daerah disusun berdasarkan hubungan antara SKPD dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)



Pemerintah Kabupaten Batang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA diterapkan secara terpadu, sejak proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Untuk akuntansi dan laporan keuangan sebagai hasil dari koordinasi belum sepenuhnya menggunakan aplikasi simda keuangan, masih didampingi secara manual guna rekonsiliasi, pengendalian dan saling uji.

Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA dalam proses penatausahaan pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS (Surat Tanda Setoran) dari BPD Jateng Cabang Batang yang telah dilakukan verifikasi menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan.
2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti pengeluaran berupa surat pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA. Selanjutnya data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi belanja.
3. Pada akhir tahun, dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta data mutasi aset selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.
4. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan laporan keuangan SKPD.



4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut.

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang dan sesuai dengan Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan *cash toward accrual basis* yakni menggunakan basis kas dan basis akrual secara bersamaan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa berdasarkan pengaruhnya terhadap Kas Daerah dan diterapkan untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.. Artinya bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Selisih jumlah pendapatan dan belanja ini disebut Surplus/Defisit. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas. Artinya aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dengan diterapkannya basis akuntansi yang berbeda untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka digunakan jurnal pendamping (*korolari*) untuk pengakuan pos-pos neraca yang terpengaruh oleh transaksi-transaksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.



B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah.. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan dan /atau penguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi jangka panjang, Aset Tetap, dana cadangan dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pengakuan Aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar harga perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Sesuai Peraturan Bupati Batang Nomor 42 tahun 2013, terhadap piutang dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih adalah berdasarkan umur piutang.



- 4) Pengakuan Persediaan dilakukan sebagai berikut :
- a) Persediaan yang berasal dari pembelian dicatat dengan harga beli terakhir;
 - b) Persediaan yang berasal dari kegiatan produksi pada SKPD dicatat sebesar biaya standar;
 - c) Persediaan yang berasal dari hibah atau donasi dicatat sebesar nilai persediaan tersebut pada saat diterima.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

- Investasi non permanen yang berupa pinjaman yang diberikan kepada kepada pihak lain dicatat sebesar nilai nominal;
- Investasi dalam proyek pembangunan dicatat sebesar harga perolehan;
- Investasi dalam bentuk hewan yang dapat berkembang biak dengan sendirinya dicatat sebesar nilai pasar yang wajar hewan tersebut pada tanggal pelaporan;
- Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya di bawah 20 % (dua puluh persen) atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi atau tidak dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat sebesar harga perolehan;
- Investasi pada perusahaan yang kepemilikannya lebih besar atau sama dengan 20 % (dua puluh persen), mempunyai kewenangan untuk mengangkat/memberhentikan direksi, atau dapat mengendalikan jalannya perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.



c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan;
- Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan, terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap;
- Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap;
- Aset tetap belum memperhitungkan penyusutan terhadap aset tetap sebagaimana diatur dalam SAP dan Buletin Teknis tentang akuntansi penyusutan.

Berdasarkan SK Bupati Batang Nomor : 050/1102/2007 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik / Kekayaan Daerah Dalam Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat/perlengkapan olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).



2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kepitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah , jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas piutang penjualan angsuran, piutang tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud termasuk hasil studi dan penelitian serta perangkat lunak aplikasi dan aset lain-lain.

Pengukuran Aset lainnya sebagai berikut :

- Piutang penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu jumlah yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo
- Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal
- Kemitraan dengan pihak ke tiga dicatat sebesar nilai nominal
- Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan.

2. Pengukuran Kewajiban

- Utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo.
- Utang dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran uang dari Rekening Umum Kas Daerah;
- b. Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.



4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

a. Pengakuan Pendapatan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 dan 22 menyatakan sebagai berikut :

Pada paragraf 21. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Oleh karena itu pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD
- Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajin melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD dan BU/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



b. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
3. Khusus untuk RSUD Batang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).



c. Penyusutan

PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 53 menyatakan bahwa, *"Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap."*

Berkaitan dengan pernyataan standar tersebut di atas, Neraca seharusnya menyajikan akumulasi penyusutan. Namun, Neraca Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2013 tidak menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Batang belum menetapkan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ringkasan aset, kewajiban, dan ekuitas untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 2.

5.1.1 ASET LANCAR..... **Rp180.600.314.557,37**

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Aset Lancar</i>	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1. Kas di Kasda	134,783,743,770.00	125,839,075,460.00
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	816,667,356.00	590,856,641.00
3. Kas di Bendahara Penerimaan	65,672,451.00	49,824,142.00
4. Kas di BLUD	11,273,535,488.00	6,520,451,162.00
5. Piutang Pajak Daerah	15,246,719,178.00	69,500,750.00
6. Piutang Retribusi	8,890,192,638.00	5,082,288,791.00
7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti	28,800,000.00	19,200,000.00
8. Piutang Dana Perimbangan	-	4,518,210.00
9. Piutang Lainnya	47,473,261.00	798,295,890.00
10. Penyisihan Piutang tak tertagih	(4,690,736,983.19)	
11. Persediaan	14,138,247,398.56	12,264,438,209.00
	180,600,314,557.37	151,238,449,255.00

1. Kas di Kas Daerah..... **Rp134.783.743.770,00**

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:



<i>Kas di Kasda</i>	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1. Kas di rekening giro	48,783,743,770.00	125,839,075,460.00
2. Kas dalam bentuk deposito	86,000,000,000.00	
Jml Kas di Kas Daerah	134,783,743,770.00	125,839,075,460.00

a). Rekening Giro.

Rekening giro bank sebesar Rp48.783.743.770,00 adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro pada Bank Jateng Cabang Batang No.1-032-00070-1 atas nama Bank Jawa Tengah Cabang Batang.

b). Deposito.

Saldo deposito sebesar Rp 86.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2013 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang.

Saldo deposito sebesar Rp 86.000.000.000,00 terperinci pada bank-bank sebagai berikut :

<i>Deposito</i>	31 Desember 2013	31 Desember 2012
1. Bank Jateng Cabang Batang	60,000,000,000.00	
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang	25,000,000,000.00	
3. Bank Tabungan Negara Pembantu Batang	1,000,000,000.00	
Jumlah Deposito	86,000,000,000.00	-

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :



- a. Bank Jateng Cabang Batang sebesar Rp60.000.000.000,00 terbagi dalam deposito dengan nilai nominal :
- masing-masing @ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berada pada 5 (lima) bilyet deposito: 104301, 104302, 104303, 104311 dan 104312 sehingga berjumlah Rp50.000.000.000,00.
 - masing-masing @ Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berada pada 2 (dua) bilyet deposito:104314 dan 104315 sehingga berjumlah Rp10.000.000.000,00.
- b. Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp25.000.000.000,00 terbagi dalam 5 (lima) bilyet deposito nomor : 5694195, 2054888, 2054889, 2054890 dan 2054891 masing-masing dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00.
- c. Bank Tabungan Negara Pembantu Batang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor bilyet deposito :1431267.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp816.667.356,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening giro bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2013 sebesar Rp816.667.356,00. Saldo tersebut terdiri atas:

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<u>31 Desember 2013</u>
1. Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah	568,890,953.00
2. Hutang belanja dan hutang PFK	245,960,312.00
3. Jasa giro	1,273,567.00
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	542,524.00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	<u><u>816,667,356.00</u></u>

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :



- 1) Sisa uang persediaan (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp568.890.953,00, yakni pada SKPD sebagai berikut:

<i>Saldo UP/TU pada bendahara pengeluaran:</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	93,407,413.00
Rumah Sakit Umum Daerah	57,601,538.00
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	117,262,950.00
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM	49,494,347.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55,000.00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	180,000.00
Bagian Umum Setda	205,000.00
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	240,632,300.00
Inspektorat	20,315.00
Kelurahan Watesalit	1,067,970.00
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3,896,800.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3,877,320.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	650,000.00
Kecamatan Subah	540,000.00
Jumlah	568,890,953.00

Sisa uang persediaan (UP/TU) tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah terakhir pada bulan Februari 2014.

- 2) Hutang belanja dan hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp245.960.312,00 terdapat pada kas di bendahara pengeluaran SKPD sebagai berikut:

<i>Hutang Jangka Pendek Lainnya dan Hutang Pajak</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.batang	2,100.00
Bagian Umum Setda Kabupaten Batang	909.00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	22,535,000.00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	400.00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	209,957,253.00
Kecamatan Batang	12,573,650.00
Kecamatan Tersono	891,000.00
Jumlah	245,960,312.00



Hutang jangka pendek lainnya dan hutang pajak terdiri dari gaji yang belum diserahkan kepada penerimanya, SP2D LS yang belum dicairkan, pajak dari kegiatan yang belum dibayarkan dan titipan dana dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan Sekolah Standar Nasional (SSN).

- 3) Jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.273.567,00 terdapat pada kas Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

<i>Jasa Giro</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	823,058.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,395.00
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	440,114.00
Jumlah Jasa Giro	1,273,567.00

- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah pada rekening bendahara pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp542.524,00 berupa angka pembulatan dari dana yang diterima oleh bendahara pengeluaran.

<i>Lain-Lain PAD yang belum disetor</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	700.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,906.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	52,325.00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	49,447.00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	42,623.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	2,000.00
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	369,899.00
Kelurahan Karangasem Selatan	466.00
Kelurahan Kasepuhan	1,952.00
Kelurahan Kauman	2,209.00
Kelurahan Poyonangan Utara	2,510.00
Kelurahan Sambong	1,208.00
Kelurahan Watesalit	1,428.00
Satuan Polisi Pamong Praja	150.00
Bagian Umum	6,701.00
Jumlah	542,524.00



3. Kas di Bendahara Penerimaan..... Rp65.672.451,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2013 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

<i>Pendapatan yang belum disetor bendahara penerimaan</i>	31 Desember 2013(Rp)
Dinas Kesehatan	56,535,011.00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	44,000.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,095,750.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	1,932,000.00
Dinas Kelautan dan Perikanan	65,690.00
Jumlah	65,672,451.00

Pendapatan tahun 2013 yang baru disetor tahun 2014 berada pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, yaitu:

a. Dinas Kesehatan, terdiri dari:

No.	Nama SKPD/UPTD	Nilai
1.	Dinas Kesehatan	53.203.000,00
2.	Puskesmas Limpung	1.682.966,00
3.	Puskesmas Subah	60.834,00
4.	Puskesmas Bawang	60.898,00
5.	Puskesmas Gringsing I	253.333,00
6.	Puskesmas Bandar I	1.273.980,00
	Jumlah	56.535.011,00

b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah : merupakan pendapatan dari denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp44.000,00.

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : merupakan pendapatan retribusi tempat rekreasi Pantai Sigandu dan Pantai Ujung Negoro sebesar Rp7.095.750,00.

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : merupakan retribusi kebersihan pasar dan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.932.000,00.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan: merupakan pendapatan dari retribusi TPI Seklayu sebesar Rp65.690,00



4. Kas di BLUD RSUD Batang..... Rp11.273.535.488,00

Kas di BLUD RSUD Batang per 31 Desember 2013 terdiri atas saldo yang terdapat di rekening kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

<i>Kas di BLUD RSUD Batang</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	11,038,114,588.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	235,420,900.00
Jumlah	11,273,535,488.00

1) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Batang sebesar Rp11.038.114.588,00 dengan rincian:

• Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08176-5	Rp7.198.648.332,00
• Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-084-01844-1	Rp 292.914,00
• Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08421-0	Rp 10.480.200,00
• Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-11722-3	Rp 376.743.852,00
• Rekening giro Bank Rakyat Indonesia Cab.Batang No.156-01-000358-30-9	Rp 3.417.041.393,00
• Tunai di Bendahara Penerimaan	Rp 34.907.897,00
	<u>Rp11.038.114.588,00</u>

2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Batang sebesar Rp235.420.900,00 Jumlah tersebut per 31 desember 2013 berada di:

• Rekening Bank Jateng Cabang Batang No.2-032-08534-5	Rp 183.466.204,00
• Kas tunai	Rp 51.954.696,00
	<u>Rp 235.420.900,00</u>



5. Piutang Pajak Daerah..... Rp15.246.719.178,00

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Berikut piutang pajak daerah per 31 Desember 2013 dan perbandingannya dengan tahun 2012 :

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
<i>Piutang Pajak:</i>	(Rp)	(Rp)
Pajak Hotel	6,143,450.00	
Pajak Hiburan	2,477,000.00	520,000.00
Pajak Reklame	15,173,000.00	53,672,750.00
Pajak Restoran	18,653,000.00	12,655,000.00
Pajak Parkir	870,000.00	
Pajak Air Tanah	28,667,100.00	
Pajak Galian Gol.C		2,653,000.00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	15,174,735,628.00	
	<u>15,246,719,178.00</u>	<u>69,500,750.00</u>

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Untuk piutang dari obyek pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak parkir, penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telah disampaikan oleh wajib pajak dalam tahun anggaran 2013. Berikut rincian terhadap piutang pajak yang dimaksud di atas:
 - 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp6.143.450,00 terdiri dari piutang untuk 6 (enam) wajib pajak meliputi hotel, homestay dan rumah kos.
 - 2) Piutang pajak hiburan sebesar Rp2.477.000,00 terdiri dari piutang untuk 13(tiga belas) wajib pajak meliputi panti pijat, kolam renang, futsal, playstation, dan cafezone.
 - 3) Piutang pajak restoran sebesar Rp18.653.000,00 terdiri dari piutang untuk 23(duapuluh tiga) wajib pajak meliputi rumah makan dan cafe.
 - 4) Piutang pajak parkir sebesar Rp870.000,00 terdiri dari piutang untuk 31(tiga puluh satu) wajib pajak.



- b. Untuk piutang dari pajak reklame dan pajak air penghitungan piutang didasarkan pada kekurangan pembayaran pajak atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang telah diterbitkan.
- 1) Piutang pajak reklame sebesar Rp15.173.000,00 merupakan piutang dari wajib pajak PT.Tiga Daratan.
 - 2) Piutang pajak air tanah sebesar Rp28.667.100,00 merupakan piutang dari 56 wajib pajak.
- c. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-013/WPJ.10/KP.14/2013 Nomor 973/138/2013 tanggal 31 Januari 2013 telah dilaksanakan serah terima/pengalihan data piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang kepada Bupati Batang dalam rangka pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah pada tanggal 31 Januari 2013.

Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa : Saldo Piutang PBB P2 yang dialihkan sebagai pajak daerah adalah sebesar Rp10.582.956.586,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Nilai tersebut adalah nilai piutang bruto untuk tahun pajak 2002 sampai dengan tahun 2012.

Pada tahun 2013 terdapat angsuran piutang untuk tahun pajak 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp249.770.525,00 dan terdapat piutang PBB-P2 tahun 2013 sebesar Rp4.841.765.080,00. Angka tersebut merupakan data piutang tahun 2013 per tanggal 27 Desember 2013.

Perhitungan saldo nilai piutang PBB P-2 adalah sebagai berikut :

<i>Piutang PBB P-2</i>	31 Desember 2013 (Rp)
Piutang PBB tahun 2002 s.d 2012 berdasarkan BA Serah Terima dari KPP Pratama Batang	10,582,956,586.00
Angsuran yang diterima di tahun 2013	(249,770,525.00)
	10,333,186,061.00
Piutang PBB tahun 2013	4,841,549,567.00
Jumlah	15,174,735,628.00



Secara terperinci, piutang PBB-P2 berdasarkan tahun pajak terlihat dalam tabel berikut :

<i>Tahun:</i>	Piutang per 31 Des 2013	Penerimaan	Piutang per 31 Des 2013
	Bruto (Rp)	Piutang	stlh dikurangi penerimaan piut
2013	4,841,549,567.00	-	4,841,549,567.00
2012	2,822,652,051.00	245,402,232.00	2,577,249,819.00
2011	2,242,796,321.00	1,273,037.00	2,241,523,284.00
2010	1,660,997,094.00	3,095,256.00	1,657,901,838.00
2009	1,184,388,511.00		1,184,388,511.00
2008	768,990,937.00		768,990,937.00
2007	442,175,685.00		442,175,685.00
2006	501,883,204.00		501,883,204.00
2005	263,367,360.00		263,367,360.00
2004	256,613,273.00		256,613,273.00
2003	292,165,495.00		292,165,495.00
2002	146,926,655.00		146,926,655.00
	15,424,506,153.00	249,770,525.00	15,174,735,628.00

Data wajib pajak PBB P-2 secara terperinci terdapat dalam software SISMIOP DPPKAD Kab. Batang. Piutang PBB tahun 2013 berdasarkan SISMIOP sebesar Rp4.705.129.954,00 sedangkan yang tersaji dalam neraca sebesar Rp4.841.549.567,00. Terdapat selisih Rp136.635.126,00 dikarenakan data yang tercantum di neraca adalah per 27 Desember 2013. Data pengalihan piutang PBB P-2 sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh DPPKAD Kabupaten Batang bersama KPP Pratama Batang. Untuk keperluan ini, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengirim surat kepada KPP Pratama Batang Nomor : 973/131/2014 Tanggal 5 Februari 2013 Perihal Permohonan dilakukan Cleancing Data Piutang PBB P-2 Tahun 2012.

6. Piutang Retribusi Daerah..... Rp 8.890.192.638,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum diterima pembayarannya, dengan rincian berdasarkan SKPD sebagai berikut:

<i>Piutang Retribusi:</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012(Rp)
Bagian Tata Pemerintahan	187,100,000.00	189,600,000.00
BLUD RSUD	7,665,799,338.00	4,892,688,791.00
Dinas Kesehatan	1,032,544,300.00	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,749,000.00	
Jumlah	8,890,192,638.00	5,082,288,791.00



Piutang retribusi tersebut di atas merupakan piutang lancar dengan umur piutang tidak lebih dari satu tahun.

Jenis piutang untuk masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1). Piutang retribusi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Batang sebesar Rp187.100.000,00 berasal dari :

<i>Piutang Retribusi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Batang</i>	31 Desember 2013 (Rp)
- tunggakan dari pemenang lelang yang belum dibayarkan sebesar	7,100,000.00
Piutang sewa pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang yang terletak di Blok	
- Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang untuk digunakan sebagai pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan fasilitas pendukung lainnya	180,000,000.00
Jumlah	187,100,000.00

- 2). Piutang Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp7.665.678.923,00 terdiri :

	31 Desember 2013 (Rp)
PT.Jamsostek	89,549,760.00
PT.Primatex	73,095,792.00
PT.Askes	411,458,439.00
Departemen Kesehatan(Jamkesmas)	7,088,898,399.00
INHEALTH	2,796,948.00
Jumlah	7,665,799,338.00

- 3) Piutang retribusi Dinas Kesehatan sebesar Rp1.032.544.300,00 terdiri dari :

<i>Piutang Retribusi Dinas Kesehatan</i>	31 Desember 2013 (Rp)
- Piutang Jasa layanan jamkesmas/jampersal yang belum diterima oleh Dinas Kesehatan pada bulan November dan Desember 2013	1,026,888,500.00
- Piutang Jamkesda	1,705,800.00
- Piutang Askes	3,950,000.00
Jumlah	1,032,544,300.00

Pada tahun 2012 piutang ini masuk dalam akun piutang lainnya.



7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp28.800.000,00

Tuntutan ganti rugi adalah ganti rugi yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor: 950/271/2006 tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Sdr. Muhammad Teguh Prajatna sebesar Rp28.800.000,00.

Berdasarkan keputusan Bupati Batang tersebut, Sdr. Muhammad Teguh Prajatna harus mengangsur Rp800.000,00 setiap bulannya. Namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum ada setoran yang masuk ke kas daerah.

8. Piutang Dana Perimbangan..... Rp0,00

Piutang dana perimbangan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp0,00. Sedangkan saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp4.518.210,00. Berikut perbandingan antara piutang dana perimbangan tahun 2013 dengan tahun 2012:

<i>Piutang Bagi hasil pajak dan bukan pajak-Pusat</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012(Rp)
Piutang SDA Gas Bumi		1,327,800.00
Piutang SDA Minyak Bumi		3,190,410.00
Jumlah	-	4,518,210.00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah.

Akun piutang dana perimbangan tahun 2013 sebesar Rp0,- didasarkan pada :

- a. Hasil penjelasan Bapak M.Agus Kristianto dari Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah pada acara Workshop Pengakuan Pendapatan Transfer Akrual dan Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Transfer Daerah Tahun Anggaran 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2014 bertempat di Hotel Mercure Jakarta Utara yang diantaranya menjelaskan bahwa apabila pada akhir tahun terjadi kurang salur atau kurang bayar dana transfer, Pemerintah Daerah baru mengakui piutang apabila ada pernyataan



kurang salur dari Pemerintah Pusat. Jika tidak ada pernyataan kurang salur dari pemerintah pusat, maka tidak diakui sebagai piutang.

- b. Berdasarkan Hasil Penelusuran terhadap Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi dan Minyak Bumi Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Batang bahwa rincian piutang terhadap realisasi Dana Bagi Hasil dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini :

<i>Uraian</i>	Pagu		Realisasi	Selisih
	PMK Penetapan	PMK Definitif		
SDA GAS BUMI PMK Nomor :08/PMK.07/2012 dan Nomor 213/PMK.07/2012	6,639,000.00	20,816,052.00	19,488,252.00	(1,327,800.00)
SDA Minyak BUMI PMK Nomor :08/PMK.07/2012 dan Nomor 213/PMK.07/2012	72,872,000.00	66,752,462.00	63,562,052.00	(3,190,410.00)
Jumlah	79,511,000.00	87,568,514.00	83,050,304.00	(4,518,210.00)

9. Piutang Lainnya..... Rp47.473.261,00

Akun piutang lain-lain menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari piutang selain piutang pajak, piutang retribusi, dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang sampai dengan 31 Desember 2011 belum diterima pembayarannya, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Piutang Lainnya</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012(Rp)
Piutang Penjualan Barang Milik Daerah	9,600,000.00	9,600,000.00
Piutang Pinjaman Modal PNS	37,873,261.00	38,329,822.00
Piutang UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan UP3	-	27,489,068.00
Sambong Dispertanak	-	722,877,000.00
Piutang Jamkesmas Dinas Kesehatan	-	-
Jumlah	47,473,261.00	798,295,890.00

- 1) Piutang Penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp9.600.000,00 merupakan Piutang atas lelang kendaraan roda empat tahun 2004 yang dimenangkan oleh



Saudara H. Solichin berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 028/235/2004 yang sampai per 31 Desember 2013 belum dilunasi.

- 2) Piutang Pinjaman modal PNS per 31 Desember 2013 sebesar Rp37.873.261,00 berasal dari saldo Pinjaman Modal Kerja tahun 2012 dikurangi dengan setoran di tahun 2013.

Berikut rincian piutang modal kerja PNS :

<i>Nama</i>	Saldo Piutang	Angsuran	Saldo Piutang
	Per 1 Januari 2013	Piutang	Per 31 Desember 2013
Sutomo	56,561.00	56,561.00	-
Didik Teguh Raharjo	10,375,000.00		10,375,000.00
Eko Saputro	8,375,000.00	400,000.00	7,975,000.00
Bunari Sishandoyo	1,648,100.00		1,648,100.00
Very Dwi Ariyanto	8,969,261.00		8,969,261.00
Munawir	8,905,900.00		8,905,900.00
	<u>38,329,822.00</u>	<u>456,561.00</u>	<u>37,873,261.00</u>

- 3) Piutang UPTD Balai Benih Padi, Palawija dan UP3 Sambong Dispertanak telah lunas di tahun 2013.
- 4) Piutang Jamkesmas/jampersal pada tahun 2013 telah direklasifikasi ke dalam piutang retribusi.

10. Penyisihan piutang tak tertagih..... (Rp4.690.736.983,19)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor :42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor :26 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang bahwa penilaian dan penyajian piutang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat *direalisasikan (net realizable value)*, yaitu penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan penyisihan piutang tak tertagih, maka untuk tahun 2013 saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2013 disajikan sebesar nilai netto berbeda dengan tahun 2012 yang masih disajikan sebesar nilai bruto.

Berikut tabel piutang pajak daerah bruto beserta penyisihan piutangnya :



<i>Piutang Pajak:</i>	Bruto (Rp)	Tak tertagih	Netto (Rp)
Pajak Hotel	6,143,450.00	30,717.00	6,112,733.00
Pajak Hiburan	2,477,000.00	12,385.00	2,464,615.00
Pajak Reklame	15,173,000.00	75,865.00	15,097,135.00
Pajak Restoran	18,653,000.00	93,265.00	18,559,735.00
Pajak Parkir	870,000.00	4,350.00	865,650.00
Pajak Air	28,667,100.00	143,335.50	28,523,764.50
Pajak Bumi dan Bangunan P2	15,170,951,141.00	4,599,352,841.50	10,571,598,299.50
Piutang penjualan BMD	9,600,000.00	9,600,000.00	-
Piutang Modal Kerja PNS	37,873,261.00	37,873,261.00	-
Piutang Jamkesmas Dinas Kesehatan	1,032,544,300.00	5,162,721.50	1,027,381,578.50
Piutang Retribusi RSUD	7,665,799,338.00	38,328,996.69	7,627,470,341.31
Piutang Retribusi Tata Pemerintahan	7,100,000.00	35,500.00	7,064,500.00
Piutang Retribusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,749,000.00	23,745.00	4,725,255.00
	<u>24,000,600,590.00</u>	<u>4,690,736,983.19</u>	<u>19,309,863,606.81</u>

11. Persediaan..... Rp14.138.247.398,56

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Persediaan ATK/Pakai Habis	613,486,241.56	233,372,715.00
2 Persediaan Obat-obatan medis	9,621,960,302.00	9,888,445,954.00
3 Persediaan Rumah tangga	6,499,300.00	497,500.00
4 Persediaan Benda Berharga	227,109,405.00	552,590,612.00
5 Persediaan Lainnya	3,669,192,150.00	1,735,500.00
	<u>14,138,247,398.56</u>	<u>10,676,642,281.00</u>



Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD.

1) Persediaan ATK

Rincian Saldo Persediaan ATK sebesar Rp613.486.241,56 berada di SKPD dengan rincian terlampir pada Lampiran 3.

2) Persediaan Obat-obatan Medis

Saldo persediaan obat-obatan medis yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.621.960.302,00 berada pada SKPD sebagai berikut:

<i>Obat-Obatan Medis</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Dinas Kesehatan	6.159.693.647,00	7.474.167.703,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah	2.964.241.584,00	1.957.890.567,00
3 Badan Pemberdayaan Peremp dan KB	498.025.071,00	456.387.684,00
	<u>9.621.960.302,00</u>	<u>9.888.445.954,00</u>

3) Persediaan Rumah Tangga

Saldo persediaan rumah tangga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.499.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Persediaan Rumah Tangga</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 RSUD	3,874,300.00	127,000.00
2 Dinas Kesehatan	1,888,000.00	
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	473,000.00	
4 Kantor Kesbangpollinmas	114,000.00	114,000.00
5 Bagian Humas dan Protokol	150,000.00	256,500.00
	<u>6,499,300.00</u>	<u>497,500.00</u>

4) Persediaan Benda Berharga.

Saldo persediaan benda berharga yang disajikan di Neraca Daerah Per 31 Desember 2013 sebesar Rp227.109.405,00 dengan rincian sebagai berikut:



<i>Persediaan Benda Berharga</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Bagian Humas dan Protokol	30,000.00	324,433,540.00
2 DPPKAD	-	8,190,000.00
3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	69,207,900.00	66,428,820.00
4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	151,096,505.00	146,759,502.00
5 Badan Pemberdayaan Masyarakat	120,000.00	48,000.00
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,655,000.00	6,730,750.00
	<u>227,109,405.00</u>	<u>552,590,612.00</u>

Persediaan benda berharga sebagaimana tersebut di atas adalah berupa materi, karcis, dan plat uji, buku uji, stiker tanda samping, kartu pos, dan traffic cone untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

5) **Persediaan Lainnya.**

Saldo persediaan lainnya disajikan di Neraca Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.669.192.150,00 berada pada SKPD sebagai berikut :

<i>Persediaan Lainnya</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Dinas Bina Marga dan SDA	103,950,000.00	956,776,500.00
2 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan	3,558,842,150.00	632511928
3 Sekretariat DPRD	6,400,000.00	
4 Kecamatan Bandar		243,000.00
	<u>3,669,192,150.00</u>	<u>1,589,531,428.00</u>

Berikut penjelasan terperinci dari tabel di atas :

a). **Dinas Bina Marga dan SDA**

Persediaan lainnya di Dinas Bina Marga dan SDA adalah berupa kawat bronjong sejumlah 5000 kg senilai Rp103.950.000,00.

b). **Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan.**



Persediaan lainnya di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan senilai Rp3.558.842.150,00 berupa :

a. Kawat Bronjong	177 rol	Rp 141.075.000,00
b. Bak penampung dan perpipaan air bersih		2.381.407.150,00
c. MCK		130.321.000,00
d. Taping jaringan listrik		715.349.000,00
e. Pembangunan gedung Persit Koramil Batang		190.690.000,00

Bak penampung dan perpipaan air bersih serta MCK rencananya akan dihibahkan ke desa-desa.

c). Sekretariat DPRD.

Persediaan lainnya di Sekretariat DPRD adalah berupa plakat DPRD Pemerintah Kabupaten Batang sebedar Rp6.400.000,00

5.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG RP62.087.690.118,12

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Batang dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2013 dengan rincian:

<i>Investasi Jangka Panjang</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Investasi Non Permanen	568,238,000.00	568,238,000.00
2 Investasi Permanen	61,519,452,118.12	58,456,918,933.79
	<u>62,087,690,118.12</u>	<u>59,025,156,933.79</u>

1. Investasi Non PermanenRp568.238.000,00

Investasi non permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang, yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka



pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah. Saldo Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2013 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk program dana bergulir dengan rincian sebagai berikut :

<i>Modal Bergulir</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 Modal Bergulir Penanaman Bibit	99,200,000.00	99,200,000.00
2 Modal Bergulir Pengembangan Usaha Ternak	85,250,000.00	85,250,000.00
3 Modal Bergulir Gaduhan Sapi	372,268,000.00	372,268,000.00
4 Modal Bergulir Gaduhan Kambing	11,520,000.00	11,520,000.00
	<u>568,238,000.00</u>	<u>568,238,000.00</u>

Berikut rincian Modal Bergulir sebesar Rp568.238.000,00 :

No	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Tunggakan
1	Padomasan	Gapoktan Tani Jaya	85,250,000
2	Wonodadi	Dadi Makmur	13,000,000
3	Padomasan	Tani Jaya	54,000,000
4	Sodong	Ngudi Makmur	149,720,000
5	Sidomulyo	Tani Makmur	11,520,000
6	Plosowangi	Dadi Mulyo	57,380,000
7	Ponowareng/Jolosekti	Mardi Rahayu	12,396,000
8	Pangempon	Raharjo	85,772,000
9	Pugangan	Tani Mandiri	37,200,000
10	Rowosari	Tani Mulyo	37,200,000
11	Kecepak	Sekar Ayu Nursery	12,400,000
12	Kalisalak	Sifa Nursery	12,400,000
			568,238,000

Saldo modal bergulir di atas merupakan modal bergulir yang masih dapat ditagih. Sedangkan untuk kategori tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih, masuk dalam akun aset lainnya.

Penilaian saldo tersebut di atas adalah dari hasil inventarisasi dana bergulir oleh Tim Inventarisasi melalui Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan dan dicatat dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.



Namun demikian, pada tahun 2014 akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap ketiga kategori modal bergulir tersebut.

2. Investasi Permanen.....Rp61.519.452.118,11

Saldo investasi permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) kecuali penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang pada PT. Bank Jawa Tengah dan PT.PRPP Jawa Tengah. Sehubungan per tanggal 31 Desember 2013, laporan keuangan Perusahaan Daerah belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik, maka penyertaan modal yang tercantum dalam neraca berdasar laporan keuangan perusahaan daerah yang belum diaudit. Berikut ini tabel rincian atas investasi permanen Pemerintah Kabupaten Batang :

<i>Investasi Permanen</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1 PT.Bank Jawa Tengah	11.715.000.000,00	10.618.000.000,00
2 PT.BPR Bapera Kab.Batang	4.469.027.460,54	3.635.254.849,21
3 PD.Aneka Usaha	2.269.449.674,00	2.202.200.223,00
4 PDAM Batang	33.761.153.380,38	30.877.181.209,16
5. PT.PRPP Jawa Tengah	464.200.000,00	464.200.000,00
6. BPR/BKK	8.370.621.603,20	8.584.948.475,74
7. Koperasi Batang Cemerlang	470.000.000,00	470.000.000,00
	<u>61.519.452.118,11</u>	<u>56.851.784.757,11</u>

- Investasi pada PT. Bank Jawa Tengah bertambah sebesar Rp1.097.000.000,- dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2013.
- Investasi pada PT. BPR Bapera Batang terdiri atas saham dengan prosentasi kepemilikan Pemerintah Daerah Batang sebesar 99,67 persen sedangkan sisanya sebesar 0,33 persen merupakan saham milik PDAM Kabupaten Batang.



- c. PD. Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang dengan kepemilikan saham sebesar 100 persen.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 1993 dan telah beberapa kali di perbaharui. Terakhir diperbaharui dengan Perda nomor 5 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Peraturan Daerah Air Minum Kabupaten Batang.

Investasi pada PDAM bertambah sebesar Rp700.000.000,- dari pos pengeluaran Pembiayaan tahun 2013.

- e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) RPP Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp464.200.000,00.

1) Penyertaan Modal pada BPR-BKK saldo yang disajikan per 31 Desember 2013 sebesar Rp8.370.621.603,20 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang yang terdapat pada:

PD. BPR-BKK Batang Rp6.626.962.467,20

PD.BKK-Bandar Rp1.743.659.136,00

- a. PD.BPR-BKK Batang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981, dengan prosentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang 50,55 persen sedangkan untuk sisanya sebesar 40,45 persen merupakan milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

- b. PD. BKK Bandar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969,



dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 64,80 persen sedangkan sisanya sebesar 35,20 persen dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Akta Notaris no 187 tanggal 5 Desember 2012 oleh Muh Mursidi, SH, MKn

5.1.3 ASET TETAPRp2.258.521.287.672,66

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun per 31 Desember 2013. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut penjelasan mengenai aset tetap yang terbagi menjadi: (1) langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam perbaikan pengelolaan aset tetap, (2) penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya, dan (3) penjelasan mengenai aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

1. Langkah-langkah dalam perbaikan pengelolaan aset tetap

Hal tersebut dilakukan sebagai Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 belum memadai, sehingga terdapat :

- a. Aset tetap yang dicatat ganda dalam KIB senilai Rp 25.832.370.810,00
- b. Aset tetap yang tidak jelas statusnya senilai Rp2.685.997.750,00
- c. Aset tetap yang tidak tercatat senilai Rp89.070,00
- d. Aset tetap yang tercatat ganda dan tidak tercatat dan diantaranya dikerjasamakan dengan lain dan bukti terkait tidak diadministrasikan dengan baik senilai Rp1.114.200.000,00
- e. Aset tetap yang tidak didukung rincian barang yang lengkap dan akurat senilai Rp10.206.200.322,00



- f. Aset tetap SD se-Kabupaten Batang yang dikompilasi oleh kepala UPTD Disdikpora se-Kabupaten Batang belum seluruhnya menyusun KIB dan aset tetap SMP/SMA senilai Rp111.256.009.077,00

Selanjutnya BPK merekomendasikan kepada Bupati Batang agar :

- Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengubah dan menambahkan mekanisme dalam SOP pengelolaan Barang Milik daerah khususnya yang mengatur hubungan tupoksi pemerolehan BMD dengan pencatatan BMD.
- Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasi pengguna barang untuk :
 - 1) Mengoreksi pencatatan ganda dalam KIB yang didukung dengan bukti yang memadai.
 - 2) Memperjelas status aset yang digunakan oleh pihak lain
 - 3) Mencatat aset tanah
 - 4) Menelusuri bukti aset yang dikerjasamakan dan dicatat dalam Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak ketiga
 - 5) Menelusuri aset tetap yang belum lengkap buktinya.
 - 6) Menyusun KIB sesuai dengan rincian barang dibawah penguasaannya.
 - 7) Merekonsiliasi catatan BMD pada masing-masing KIB antar pengguna barang.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan langkah-langkah penting antara lain :

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 7 SOP.



- b. Melakukan koreksi atas pencatatan ganda dalam KIB.
- c. Melakukan rekonsiliasi barang milik daerah per 31 Desember 2012 dengan SKPD terkait (sesuai Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Batang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).
- d. Melakukan pembinaan penatausahaan kepada pengurus barang dan penyimpan barang seluruh SKPD.
- e. Melakukan sensus barang milik daerah.
- f. Melakukan kodifikasi barang milik daerah.

2. Penjelasan mengenai saldo aset tetap beserta mutasinya :

Saldo aset tetap per 31 Desember 2012, mutasi tahun 2013, dan saldo per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

<i>Aset tetap</i>	Saldo awal(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir(Rp)
Tanah	588.883.433.831,00	13.339.830.800,00	13.564.276.442,00	588.658.988.189,00
Peralatan dan Mesin	220.383.613.101,00	46.196.335.998,00	14.370.142.199,50	252.209.806.899,50
Gedung dan Bangunan	546.136.576.295,09	87.473.516.674,88	36.186.291.837,39	597.423.801.132,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	709.204.855.809,00	63.411.407.827,03	23.692.775.069,10	748.923.488.566,93
Aset tetap lainnya	46.382.303.301,00	2.955.818.395,00	418.491.975,00	48.919.629.721,00
Konstruksi dalam pengerjaan	5.841.845.882,00	21.957.803.704,65	5.414.076.423,00	22.385.573.163,65
	2.116.832.628.219,09	235.334.713.399,56	93.646.053.945,99	2.258.521.287.672,66

Nilai aset tetap per 31 Desember 2013 di atas, telah didukung oleh Kartu Inventaris Barang SKPD. Dalam akun aset tetap tersebut termasuk aset tetap yang tidak ditemukan secara fisik yang merupakan hasil sensus Berikut rincian barang yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD namun tidak ditemukan secara fisik :



	Hasil Sensus Nilai (Rp)
KIB B (Peralatan dan Mesin)	3,693,814,297.00
KIB C (Gedung dan Bangunan)	3,699,796,212.00
KIB D (Jalan, irigasi dan Jaringan)	29,956,500.00
KIB E (Aset Tetap Lainnya)	569,022,499.00
	<u>7,992,589,508.00</u>

Penambahan nilai aset terdiri atas: (1) penambahan aset dari belanja modal (2) penambahan aset yang berasal dari APBN; (3) penambahan aset dari hibah; (4) penambahan aset dari koreksi akuntansi atas sensus barang; (5) penambahan aset dari hasil mutasi antar SKPD; (6) penambahan aset dari retensi (7) penambahan aset dari bukan belanja modal (8) klasifikasi masuk berupa pengelompokan aset.

Pengurangan nilai aset terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap, dan (2) pengurangan aset karena mutasi antar SKPD; (3) pengurangan aset karena hibah; (4) pengurangan aset karena koreksi akuntansi hasil sensus; (5) pengurangan aset karena rusak berat, (6) pengurangan aset karena extracomptable (7) pengurangan aset karena mutasi antar rekening dalam SKPD.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Penambahan aset tetap

1) Penambahan aset tetap dari belanja modal.

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :



<i>Uraian</i>	Realisasi Belanja Modal 2013 (Rp)
1 Tanah	587,065,800.00
2 Peralatan dan Mesin	37,529,804,374.00
3 Gedung dan Bangunan	60,663,468,303.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,803,318,367.00
5 Aset tetap lainnya	682,813,600.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>148,266,470,444.00</u>

Besarnya realisasi belanja modal untuk setiap SKPD dapat dilihat dalam lampiran 4.

2) Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Batang dari dana APBN dapat dirinci sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	APBN 2013
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	1,455,551,400.00
3 Gedung dan Bangunan	11,002,930,480.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	6,750,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>12,465,231,880.00</u>

Penambahan aset dari dana APBN tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	APBN
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8,270,373,400.00
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	409,466,400.00
3 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3,785,392,080.00
	<u>12,465,231,880.00</u>

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dana APBN yang diterima oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah berupa bantuan blockgrant ke sejumlah sekolah



untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru dan peralatan praktek. Sekolah penerima block grant sejumlah 33 sekolah dengan rincian :

- a. Jenjang SD sejumlah 17 sekolah
- b. Jenjang SMP sejumlah 2 sekolah
- c. Jenjang SMA sejumlah 5 sekolah
- d. Jenjang SMK sejumlah 9 sekolah

Atas penggunaan dana tersebut, maka aset tetap di Dinas Pendidikan bertambah untuk kelompok aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp640.000.000,00 dan aset gedung dan bangunan bertambah Rp7.630.373.400,00.

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapat bantuan peralatan dan mesin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliputi :

- a. alat-alat berat sebesar Rp91.360.500,00 antara lain berupa mesin pompa air dan mesin penetralisir air.
- b. alat-alat angkutan berupa perahu karet sebesar Rp92.759.900,00
- c. alat-alat kantor rumah tangga sebesar Rp4.037.000,00
- d. alat studio dan komunikasi antara lain berupa radio lokal dan HT sebesar Rp33.165.000,00
- e. alat-alat keamanan antara lain berupa gergaji mesin, tenda posko sebesar Rp188.144.000,00

3) Penambahan aset tetap dari Hibah

Penambahan aset tetap dari hibah hanya terjadi pada SKPD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Yakni mendapatkan hibah dari



Kementrian Lingkungan Hidup berupa mesin pencacah plastik, mesin jahit, meja mesin jahit dan timbangan gantung analog. Atas hibah tersebut, maka aset tetap di Badan Lingkungan Hidup bertambah untuk kelompok aset alat-alat berat senilai Rp19.783.389,00 dan alat-alat kantor rumah tangga senilai Rp7.870.167,00. Sehingga seluruhnya berjumlah Rp27.653.556,00

4) Penambahan aset tetap dari koreksi akuntansi hasil sensus barang tahun 2013/ hasil rekonsiliasi, terinci pada kelompok aset sbb:

<i>Uraian</i>	hasil sensus barang
1 Tanah	12,752,765,000.00
2 Peralatan dan Mesin	2,479,463,430.00
3 Gedung dan Bangunan	3,302,979,200.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	136,140,900.00
5 Aset tetap lainnya	16,269,960.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>18,687,618,490.00</u>

Kelompok aset di atas berada pada SKPD sebagai berikut :

<i>SKPD</i>	Hasil Sensus 2013
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	865,481,060.00
2 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17,000,000.00
3 Dinas Kesehatan	7,103,571,700.00
4 Kecamatan Wonotunggal	168,263,550.00
5 Kecamatan Warungasem	9,897,950.00
6 Rumah Sakit Umum Daerah	500,000,000.00
7 Bagian Hukum	5,650,000.00
8 Bagian Umum	1,868,774,230.00
9 Bagian Pengendalian Pembangunan	25,600,000.00
10 Bagian Tata Pemerintahan	8,123,380,000.00
	<u>18,687,618,490.00</u>

5) Penambahan aset tetap dari mutasi antar SKPD terinci pada kelompok aset sebagai berikut:



<i>Uraian</i>	<u>Mutasi Antar SKPD</u>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	1,433,372,553.00
3 Gedung dan Bangunan	5,251,735,003.39
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,099,520.00
5 Aset tetap lainnya	140,000,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>6,827,207,076.39</u>

Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	<u>Mutasi Antar SKPD</u>
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga	41,721,680.00
2 Dinas Kelautan dan Perikanan	140,000,000.00
3 Dinas Perindustrian Perdagangan an Koperas	652,387,757.41
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	504,144,020.00
5 Kecamatan Batang	83,507,332.60
6 Kecamatan Subah	14,820,850.00
7 Kecamatan Bandar	233,213,947.00
8 Kecamatan Tulis	247,896,507.83
9 Kecamatan Reban	108,414,281.63
10 Kecamatan Tersono	146,264,468.90
11 Kecamatan Bawang	83,537,332.60
12 Kecamatan Wonotunggal	12,815,000.00
13 Kecamatan Blado	306,205,406.43
14 Kecamatan Gringsing	61,266,467.00
15 Kecamatan Warungasem	248,620,944.39
16 Kecamatan Limpung	61,351,293.33
17 Kecamatan Kandeman	12,815,000.00
18 Kecamatan Pecalungan	12,815,000.00
19 Kecamatan Banyuputih	12,815,000.00
20 Inspektorat	137,250,000.00
21 Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	159,602,058.02
22 Badan Kepegawaian	2,508,435,123.00
23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,000,000.00
24 Badan Lingkungan Hidup	177,475,906.25
25 Bupati dan Wakil Bupati	47,430,300.00
26 Bagian Umum	805,401,400.00
	<u>6,827,207,076.39</u>



6) Penambahan aset tetap dari retensi (biaya pemeliharaan fisik)

yang akan dibayarkan tahun 2014 terinci pada kelompok aset sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Retensi 2014
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	
3 Gedung dan Bangunan	1,257,673,850.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,217,611,233.00
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>2,475,285,083.00</u>

Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD sebagai berikut :

<i>SKPD</i>	Retensi 2014
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga	91,184,200.00
2 Dinas Kesehatan	193,108,150.00
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	38,138,850.00
4 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM	972,239,000.00
5 Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan	34,283,500.00
6 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	136,328,650.00
7 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	58,900,600.00
8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	38,514,650.00
9 Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	16,812,200.00
10 Rumah Sakit Umum Daerah	18,669,000.00
11 Dinas Bina Marga dan SDA	877,106,283.00
	<u>2,475,285,083.00</u>

Penambahan Aset dari Bukan Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	Bukan Belanja Modal
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	2,155,518,933.00
3 Gedung dan Bangunan	2,009,743,898.49
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,425,632,989.03
5 Aset tetap lainnya	2,017,357,835.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	2,938,763,542.65
	<u>16,547,017,198.17</u>



Penambahan aset dari bukan belanja modal diantaranya karena adanya kurang catat aset ditahun 2012, biaya pemeliharaan gedung di atas 20 juta rupiah, hadiah yang kemudian menjadi aset SKPD dan lain-lain. Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD terlampir pada Lampiran 5.

7) Penambahan Aset tetap dari mutasi antar kelompok rekening
terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	<u>Mutasi Antar rekening</u>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	1,114,971,752.00
3 Gedung dan Bangunan	3,984,985,940.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,826,604,818.00
5 Aset tetap lainnya	92,627,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	19,019,040,162.00
	<u>30,038,229,672.00</u>

Kelompok aset tersebut menambah aset tetap pada SKPD terlampir pada Lampiran 6.

b. Pengurangan Aset tetap

1. Pengurangan aset tetap karena penghapusan di tahun 2013
terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	<u>Penghapusan</u>
1 Tanah	1,108,800,000.00
2 Peralatan dan Mesin	654,514,864.00
3 Gedung dan Bangunan	2,314,798,000.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	4,540,400.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>4,082,653,264.00</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut :



<i>SKPD</i>	Penghapusan
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1,513,163,764.00
2 Dinas Kesehatan	719,260,000.00
3 Dinas Perhubungan Komukasi dan Informatika	25,892,000.00
4 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	416,785,000.00
5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan	8,000,000.00
6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	60,000,000.00
7 Badan Penanaman Modan dan PT	29,830,000.00
8 Bagian Umum	200,922,500.00
9 Bagian Tata Pemerintahan	1,108,800,000.00
	<u>4,082,653,264.00</u>

2. **Pengurangan aset tetap karena mutasi antar SKPD** terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	mutasi Antar SKPD
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	1,433,372,553.00
3 Gedung dan Bangunan	5,251,735,003.39
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,099,520.00
5 Aset tetap lainnya	140,000,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>6,827,207,076.39</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	Mutasi antar SKPD
1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	287,070,900.00
2 Dinas Kehutanan dan Perkebunan	64,538,700.00
3 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	2,377,055,003.00
3 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	437,045,500.00
4 Satuan Polisi Pamong Praja	7,000,000.00
5 Badan Kepegawaian	676,944,020.00
6 Badan Lingkungan Hidup	320,977,530.00
7 Bagian Umum	2,555,865,423.00
8 Bagian Organisasi	100,710,000.00
	<u>6,827,207,076.00</u>



3. **Pengurangan aset tetap karena hibah** terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	HIBAH
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	2,350,349,130.00
3 Gedung dan Bangunan	2,412,435,988.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,483,172,280.10
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>19,245,957,398.10</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	HIBAH
1 Bagian Umum	1,692,296,150.00
2 Badan Lingkungan Hidup	3,610,530.00
3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	249,975,000.00
4 Dinas Pendidikan	2,425,550,450.00
5 Dinas Cipta Karya dan TRK	14,874,525,268.10
	<u>19,245,957,398.10</u>

4. **Pengurangan aset tetap karena koreksi akuntansi hasil sensus/rekonsiliasi** terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	sensus BMD
1 Tanah	12,192,150,000.00
2 Peralatan dan Mesin	2,081,970,075.00
3 Gedung dan Bangunan	9,586,634,351.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5 Aset tetap lainnya	500,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	
	<u>23,861,254,426.00</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut



<i>SKPD</i>	sensus BMD
1 Dinas Bina Marga dan SDA	6,080,112,200.00
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,930,000.00
3 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM	359,547,000.00
4 Dinas Kehutanan dan Perkebunana	62,612,544.00
5 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	450,000.00
6 Dinas Kesehatan	4,626,464,632.00
6 Kecamatan Blado	58,800,000.00
7 Sekretariat DPRD	715,500,000.00
8 Bagian Umum	4,756,838,050.00
9 Bagian Tata Pemerintahan	7,194,000,000.00
	<u>23,861,254,426.00</u>

5. **Pengurangan aset tetap karena rusak berat terinci** pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	Rusak berat
1 Tanah	-
2 Peralatan dan Mesin	5,492,729,054.00
3 Gedung dan Bangunan	1,751,249,000.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	617,739,750.00
5 Aset tetap lainnya	7,244,575.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	-
	<u>7,868,962,379.00</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD terlampir pada Lampiran 7.

6. Pengurangan aset tetap karena nilai aset tetap per unitnya kurang dari Rp500.000,00 (extracomtable) terdapat pada kelompok aset peralatan dan mesin senilai Rp1.179.833.921,00 sehingga mengurangi aset tetap.
7. **Pengurangan aset karena mutasi antar rekening** terinci pada kelompok aset sebagai berikut :



<i>Uraian</i>	<u>mutasi antar rekening</u>
1 Tanah	
2 Peralatan dan Mesin	1,086,548,492.00
3 Gedung dan Bangunan	14,781,656,161.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,500,243,601.00
5 Aset tetap lainnya	266,207,000.00
6 Konstruksi dalam pengerjaan	5,403,574,418.00
	<u>30,038,229,672.00</u>

8. **Pengurangan aset karena selain kategori di atas** terinci pada kelompok aset sebagai berikut :

<i>Uraian</i>	<u>mutasi antar rekening</u>
1 Tanah	263,326,442.00
2 Peralatan dan Mesin	90,824,110.00
3 Gedung dan Bangunan	87,783,334.00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,519,918.00
5 Aset tetap lainnya	
6 Konstruksi dalam pengerjaan	10,502,005.00
	<u>541,955,809.00</u>

Kelompok aset tersebut mengurangi aset tetap pada SKPD sebagai berikut:

<i>SKPD</i>	<u>Lain-Lain</u>
1 DPPKAD	5,805,110.00
2 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	251,852,931.00
3 Dinas Bina Marga dan SDA	89,519,918.00
4 Satuan Polisi Pamong Praja	17,390,000.00
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,000,500.00
6 Sekretariat DPRD	6,240,000.00
6 RSUD	10,502,005.00
7 Kantor Perpustakaan dan Arsip	15,494,600.00
8 Bagian Pengendalian Pembangunan	48,735,000.00
9 Bagian Tata Pemerintahan	84,415,745.00
	<u>541,955,809.00</u>



c. Aset tetap per 31 Desember 2013 berdasarkan SKPD

Nilai perolehan aset tetap di neraca sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dijelaskan pada setiap akun aset tetap di setiap SKPD sebagaimana uraian di bawah ini :

- 1). Tanah Rp588.658.988.189,00

Nilai tanah yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp588.658.988.189,00 naik sebesar Rp224.455.642,00 atau 0,04% dibandingkan dengan aset tanah dalam neraca tahun 2012. Nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

Dalam saldo tanah sebesar Rp588.922.314.631,00 terdapat tanah seluas 44.310m² yang berlokasi di pasar Bandar yang masih dalam penelusuran atas hak-hak tanah tersebut.

Di dalam tanah seluas 44.310m² tersebut terdapat tanah yang dikerjasamakan seluas 7.115m².

- 2). Peralatan dan MesinRp252.209.806.899,50,00

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp252.209.806.899,50,- naik sebesar Rp31.826.193.798,50 atau 14,44% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2012.

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin :



<i>Peralatan dan Mesin</i>	Neraca Per 31 Des 2013	Neraca Per 31 Des 2012	Naik (turun)
Alat-alat besar	17,596,715,021.00	10,326,783,882.00	7,269,931,139.00
Alat -alat angkutan	69,544,224,771.00	61,030,508,012.00	8,513,716,759.00
alat-alat bengkel dan alat ukur	2,211,287,646.00	1,650,083,471.00	561,204,175.00
alat-alat pertanian dan peternakan	968,562,800.00	823,766,100.00	144,796,700.00
alat-alat kantor dan rumah tangga	98,458,448,566.50	89,052,690,530.00	9,405,758,036.50
alat-alat studio dan komunikasi	9,322,247,798.00	7,827,072,880.00	1,495,174,918.00
alat-alat kedokteran	24,490,075,372.00	21,799,782,765.00	2,690,292,607.00
alat-alat laboratorium	29,200,020,205.00	27,681,340,241.00	1,518,679,964.00
alat-alat keamanan	418,224,720.00	191,585,220.00	226,639,500.00
	252,209,806,899.50	220,383,613,101.00	31,826,193,798.50

Nilai peralatan dan mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

3). Gedung dan Bangunan Rp597.423.801.132,58,00

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp597.423.801.132,58,- naik sebesar Rp51.287.224.837,00 atau 9,39% dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan dalam neraca tahun 2012.

Nilai gedung dan bangunan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

4). Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp748.923.488.566,93

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp748.923.488.566,93 naik sebesar Rp33.138.485.057,93,00 atau 4,67% dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan dalam neraca 2012.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.



5). Aset tetap lainnya Rp48.919.629.721,00

Nilai aset tetap lainnya yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp48.919.629.721,00 naik sebesar Rp2.537.326.420,00 atau 5,47% dibandingkan dengan aset tetap lainnya yang disajikan dalam neraca 2012.

Berikut daftar rincian aset tetap lainnya berdasarkan jenisnya:

<i>Aset tetap Lainnya</i>	Neraca Per 31 Des 2013	Neraca Per 31 Des 2012	Naik (turun)
buku dan kepastakaan	44,076,703,023.00	41,857,376,803.00	2,219,326,220.00
Barang bercorak seni dan budaya	3,993,853,935.00	3,772,239,735.00	221,614,200.00
Hewan, ternak dan tumbuhan	849,072,763.00	752,686,763.00	96,386,000.00
	48,919,629,721.00	46,382,303,301.00	2,537,326,420.00

Nilai aset tetap lainnya berdasarkan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

6). Konstruksi dalam pengerjaan Rp22.385.573.163,65

Nilai Konstruksi dalam pengerjaan yang tersaji di neraca daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp5.841.845.882,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp16.543.727.281,65.

Berikut daftar konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2013 dan 2012:

<i>SKPD</i>	Neraca Per 31 Des 2013	Neraca Per 31 Des 2012	Naik (turun)
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM	12,541,241,340.65	834,981,509.00	11,706,259,831.65
Rumah Sakit Umum Daerah	4,000,601,117.00	2,527,353,005.00	1,473,248,112.00
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3,432,825,640.00	733,701,750.00	2,699,123,890.00
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	473,876,400.00	1,745,809,618.00	(1,271,933,218.00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan OR	219,015,295.00		
Dinas Kesehatan	1,718,013,371.00		
	22,385,573,163.65	5,841,845,882.00	14,606,698,615.65



Rincian kegiatan di SKPD terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM, berupa kegiatan:	
- Pembangunan Gedung Kantor	Rp7.831.807.691,40
- Penataan RTH	Rp4.505.850.514,00
- Koordinasi dan fasilitasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab.Batang	Rp 203.583.135,25
	<hr/>
	Rp12.541.241.340,65
2. Rumah Sakit Umum Daerah, berupa kegiatan :	
- Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Rp4.000.601.117,00
3. Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika, berupa kegiatan:	
- Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Rp 63.030.550,00
- Pembangunan pelabuhan	Rp3.369.795.090,00
	<hr/>
	Rp3.432.825.640,00
4. Dinas Bina Marga dan SDA	
- Pembangunan jembatan Desa Siwatu Kec. Wonotunggal	Rp 473.876.400,00
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga	
- Pembangunan Gedung sekolah SMKN 1 Blado	Rp219.015.295,00
6. Dinas Kesehatan	
Pembangunan dan Rehab Puskesmas dan jaringannya	Rp 142.182.600,00
- Pembangunan Rumah Sakit	Rp1.575.830.771,00
	<hr/>
	Rp 1.718.013.371,00

5.1.4 ASET LAINNYA Rp14.685.304.476,00

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut :



<i>SKPD</i>	Neraca Per 31 Des 2013	Neraca Per 31 Des 2012	Naik (turun)
Tagihan Penjualan Angsuran- Penjualan Kios	682,548,400.00	763,011,650.00	(80,463,250.00)
Kemitraan dengan Pihak ketiga	178,910,697.00	-	
Tuntutan Ganti Rugi	41,440,909.00	53,950,000.00	(12,509,091.00)
Piutang Retribusi	57,500,000.00	57,500,000.00	-
Aset tak Berwujud	162,585,200.00	113,850,200.00	48,735,000.00
Aset lain-lain	13,562,319,270.00	7,123,882,558.00	
	14,685,304,476.00	8,112,194,408.00	(44,237,341.00)

1) Tagihan Penjualan angsuran-Penjualan kios merupakan saldo tagihan penjualan angsuran kios yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2) Kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga bangunan pasar Bandar dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan CV.PD Nomor 644.1/488 tanggal 11 Februari 1991. Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Batang menandatangani kembali perjanjian kerjasama nomor:168/2001 tentang Pengembangan Pembangunan Pasar Bandar di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan CV.PD. Berdasarkan perjanjian tersebut CV.PD membangun ruko, kios dan loos diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Batang senilai Rp178.910.697,00. Sebagai kompensasi, CV PD diberikan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun. Sampai dengan tahun 2013, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.

3) Tuntutan Ganti rugi merupakan saldo angsuran sdr Mulyarsih dan Sdr M. Teguh Prajatna.

4) Piutang retribusi merupakan saldo retribusi sewa tanah garapan yang macet.

5) Aset tak berwujud berupa software penatausahaan pendapatan (Simpatda) di DPPKAD Kab. Batang dan software LPSE di Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang.



- 6) Aset lain-lain terdiri dari dana bergulir yang tidak tertagih dan diragukan tertagih sebesar Rp2.082.976.950,00 dan barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp11.479.342.320,00.

Rincian dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih tampak dalam tabel berikut ini :

Tahun Perolehan	Modal Bergulir	Kondisi per 31 Desember 2013 (Rp)	
		Benar-benar tdk dapat ditagih	Diragukan Dapat Ditagih
2005-2008	Modal Bergulir Penanaman Bibit	1,074,460,000.00	
2003-2007	Modal Bergulir Pengembang Usaha Ternak	460,560,350.00	405,402,600.00
2007-2008	Modal Bergulir Gaduhan Sapi	142,554,000.00	
		1,677,574,350.00	405,402,600.00

Atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batang tertanggal 16 Oktober 2012 bahwa saldo investasi Non Permanen – Modal Bergulir dengan kategori benar-benar tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih karena puso, ternak mati, dan tidak mampu diusulkan penghapusan maka pada tanggal 8 Maret 2013 Pemerintah Kabupaten Batang telah mencoba menyerahkan data modal bergulir tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, namun belum dapat ditindaklanjuti oleh KPKNL dikarenakan kekuranglengkapan data. Data Modal Bergulir dengan kategori tidak dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih dapat dilihat pada Lampiran 9.

5.1.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Rp10.508.933.266,26

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2013, yang meliputi Bagian Lancar Utang Dalam Negeri, Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:



<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2010(Rp)
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	162,506,562.26	162,506,562.26
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2,715,208.00	1,785,000.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	10,343,711,496.00	4,365,992,383.00
	<u>10,508,933,266.26</u>	<u>4,530,283,945.26</u>

1). Bagian Lancar Utang Dalam Negeri

Akun ini merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Hutang jangka panjang dimaksud adalah Penerusan Pinjaman (*Sub Loan Agreement – SLA*) dari Pemerintah Pusat d.h.i. Departemen Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA-860/DP3/1996 tanggal 30 Januari 1996.

2). Utang Perhitungan Pihak ketiga

Tahun 2013terdapat hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp2.715.208,00 merupakan Pungutan Pajak kegiatan yang belum disetor ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3). Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berikutnya adalah sebesar Rp10.343.711.496,00 dengan rincian sebagai berikut :

<i>Kewajiban Jangka Pendek:</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Utang Retensi	3,021,587,788.00	1,696,289,255.00
Utang Belanja	7,322,123,708.00	2,669,703,128.00
	<u>10,343,711,496.00</u>	<u>4,365,992,383.00</u>



- a. Utang retensi sebesar Rp3.021.586.288,00 merupakan hutang kepada pihak ketiga karena 5% pemeliharaan kegiatan fisik, waktu pemeliharaan melampaui tahun anggaran 2013 berada di SKPD, sebagaimana terlihat dalam SKPD berikut :

<i>Utang Retensi</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	113,542,350.00	150,871,650.00
Dinas Kesehatan	193,108,150.00	
Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air	1,253,352,538.00	599,260,300.00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	-	27,623,250.00
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	34,283,500.00	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	38,138,850.00	84,633,900.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ko	136,328,650.00	80,762,300.00
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral	1,119,937,300.00	444,700,675.00
Dinas Perhubungan komunikasi dan Infor	58,900,600.00	103,304,980.00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KE	38,514,650.00	-
Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Keta	16,812,200.00	18,868,850.00
Rumah Sakit Umum Daerah	18,669,000.00	186,263,350.00
	<u>3,021,587,788.00</u>	<u>1,696,289,255.00</u>

- b. Utang belanja

Utang belanja sebesar 7.322.125.208,00 merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan SKPD tetapi belum sempat dibayarkan melalui belanja SKPD. Hutang tersebut berupa belanja pegawai non PNS, belanja barang /jasa. Belanja tersebut baru bisa dibayarkan oleh bendahara pada tahun 2014.



<i>Utang Belanja</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	22,535,000.00	327,456,347.00
Dinas Kesehatan	-	623,668,500.00
Rumah Sakit Umum Daerah	7,078,878,604.00	1,630,794,462.00
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	400.00	40,233,600.00
Satuan Polisi Pamong Praja		11,030,096.00
Dinas Kelautan dan Perikanan		7,865,450.00
Kecamatan Batang	12,573,650.00	11,479,600.00
Kecamatan Tulis	891,000.00	524,150.00
Kecamatan Limpung		2,106,650.00
Kecamatan Bawang		810,000.00
Kecamatan Wonotunggal		780,000.00
Kecamatan Warungasem		12,954,273.00
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	207,242,045.00	
Bagian Kesejahteraan rakyat	2,100.00	
Bagian Umum	909.00	
	7,322,123,708.00	2,669,703,128.00

5.1.6 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.....Rp243.759.843,39

Saldo Utang Jangka Panjang adalah jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Saldo utang Jangka Panjang yang disajikan di Neraca Daerah merupakan Hutang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Sub Loan Agreement No. 860 Tahun 1996). Nilai tersebut merupakan bagian jangka panjang dari nilai pokok pinjaman yang belum jatuh tempo.

<i>Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat</i>	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Utang Penerusan Pinjaman No.SLA -867/DP3/1996	243.759.843,39	406.266.405,65
	243.759.843,39	406.266.405,65



5.1.7 EKUITAS DANARp2.505.141.903.714,50

Ekuitas Dana menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.505.141.903.714,50 meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI) sebagai berikut:

<i>Ekuitas Dana:</i>	<u>31 Desember 2013(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012(Rp)</u>
1 Ekuitas Dana Lancar	170,091,381,291.11	144,814,480,242.74
2 Ekuitas Dana Investasi	2,335,050,522,423.39	2,183,563,713,155.23
Jumlah Ekuitas Dana	<u><u>2,505,141,903,714.50</u></u>	<u><u>2,328,378,193,397.97</u></u>

1) Ekuitas Dana Lancar

Akun Ekuitas Dana Lancar menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2013 yang berasal dari pengelolaan aset lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas:

<i>Ekuitas Dana Lancar:</i>	<u>31 Desember 2013 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2012 (Rp)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	146,693,658,753.00	132,571,134,261.00
Pendapatan yang Ditangguhkan		91,313,258.00
Cadangan Piutang	19,522,448,093.81	5,530,854,018.00
Cadangan Persediaan	14,138,247,398.56	10,676,642,281.00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(10,262,972,954.26)	(4,055,463,575.26)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	<u><u>170,091,381,291.11</u></u>	<u><u>144,814,480,242.74</u></u>

Berikut penjelasan masing-masing rincian Ekuitas Dana Lancar :

- (a) SiLPA sebesar Rp146.693.658.753,00 yaitu saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (BUD) sebesar Rp134.783.743.770,00, saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp570.707.044,00 saldo kas di bendahara penerimaan SKPD sebesar Rp65.672.451,00 dan saldo Kas di BLUD RSUD Batang sebesar Rp11.273.535.488,00.



(b) Cadangan Piutang dan Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari Piutang dan Persediaan pada Aset Lancar.

2) Ekuitas Dana Investasi

Akun Ekuitas Dana Investasi menggambarkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang per 31 Desember 2013 yang berasal dari pengelolaan aktiva jangka panjang, yang terdiri atas:

<i>Ekuitas Dana Investasi:</i>	31 Desember 2013(Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	62,087,690,118.12	59,025,156,933.79
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,258,521,287,672.66	2,116,832,628,219.09
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	14,685,304,476.00	8,112,194,408.00
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(243,759,843.39)	(406,266,405.65)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2,335,050,522,423.39	2,183,563,713,155.23

Masing-masing pos ekuitas dana investasi tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang berupa investasi nonpermanen sebesar Rp568.238.000,00 dan investasi permanen sebesar Rp61.519.452.118,12. Kenaikan nilai ekuitas dana diinvestasikan dalam investasi jangka panjang berasal dari penambahan penyertaan modal.
- b. Ekuitas dana dalam aset tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang yang berupa aset tetap. Kenaikan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap berasal dari kenaikan nilai aset tetap karena penambahan aset dari belanja modal, penambahan aset dari donasi/hibah, penambahan dari sensus serta penurunan karena penghapusan.
- c. Jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Batang yang berupa tagihan penjualan



angsuran kios, piutang TPTGR, aset kemitraan dengan pihak ketiga, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang merupakan bagian dari ekuitas Pemerintah Kabupaten Batang yang harus disediakan untuk penyelesaian utang jangka panjang.



5.2. PENJELASAN POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rekapitulasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 1a dan 1b.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

5.2.1 REALISASI PENDAPATAN..... Rp1.086.627.383.076,00

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah Kabupaten Batang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Termasuk di dalamnya pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening kas umum daerah sebagaimana tercantum dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor: 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD terdapat pada Lampiran 10.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam tahun anggaran 2013 serta realisasi tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2013		Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah	112.339.381.119,00	143.502.571.339,00	84.720.049.515,00
2 Pendapatan Transfer	899.020.093.610,00	907.042.678.471,00	830.321.907.195,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	36.802.896.000,00	36.082.133.266,00	18.901.700.000,00
	1.048.162.370.729,00	1.086.627.383.076,00	933.943.656.710,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan tahun 2013 lebih besar Rp38.465.012.347,00 atau 3,67%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pendapatan tahun 2013 lebih besar Rp152.683.726.366,00 atau meningkat 16,35%.



Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH..... Rp143.502.571.339,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas (1) pendapatan pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD tahun 2013 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Pendapatan Asli Daerah:</i>			
a Pajak Daerah	34.137.500.000,00	40.333.063.058,00	17.246.379.938,00
b Hasil Retribusi Daerah	23.668.317.250,00	35.812.498.970,00	16.303.639.041,00
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.899.463.438,00	5.647.941.063,00	5.367.435.011,00
d Lain-lain PAD yang Sah	49.634.100.431,00	61.709.068.248,00	45.802.595.525,00
	112.339.381.119,00	143.502.571.339,00	84.720.049.515,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD tahun 2013 lebih besar Rp31.163.190.220,00 atau 27,74%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi PAD tahun 2013 lebih besar Rp58.782.521.824,00 atau meningkat 69,38%.

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2013 dan 2012 diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah..... Rp40.333.063.058,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Batang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi selama tahun anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :



<i>Pendapatan Pajak Daerah:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	224.000.000,00	232.198.630,00	223.884.945,00
Pajak Restoran	853.000.000,00	1.179.354.531,00	797.763.984,00
Pajak Hiburan	100.000.000,00	110.709.700,00	102.904.500,00
Pajak Reklame	950.000.000,00	1.028.842.730,00	898.014.775,00
Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000,00	13.821.042.470,00	11.654.572.054,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	188.000.000,00	222.135.500,00	246.069.354,00
Pajak Parkir	12.500.000,00	15.035.000,00	-
Pajak Air Tanah	260.000.000,00	311.489.507,00	275.729.861,00
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	65.400.000,00	89.800.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	11.000.000.000,00	13.821.442.515,00	-
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.500.000.000,00	9.525.412.475,00	2.957.640.465,00
	34.137.500.000,00	40.333.063.058,00	17.246.379.938,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan pajak tahun 2013 lebih besar Rp6.195.563.058,00 atau naik 18,15%. Kenaikan terbesar ada pada pajak restoran yaitu sebesar 38,26% dari anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pendapatan pajak tahun 2013 lebih besar Rp23.086.683.120,00 atau meningkat 133,86%.

Dari tabel tersebut diketahui pula bahwa semua obyek pajak dari jenis pajak daerah melebihi target termasuk 2 (dua) jenis pajak baru yaitu pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan maupun peningkatan tertib administrasi pajak daerah serta keberhasilan kinerja petugas pemungut, disamping makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

b. Realisasi Retribusi Daerah..... ..Rp35.812.498.970,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil, dengan realisasi pada tahun anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Retribusi Daerah:			
Retribusi Jasa Umum			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.534.050.000,00	9.016.765.750,00	8.042.828.389,00
Persampahan/Kebersihan	288.180.750,00	164.575.200,00	162.405.300,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Umum	381.540.000,00	512.789.000,00	688.895.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00	200.100.000,00	125.270.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.606.609.500,00	1.607.615.863,00	1.627.087.899,00
	175.237.000,00	278.007.000,00	255.736.000,00
	11.185.617.250,00	11.779.852.813,00	10.902.222.588,00
Retribusi Jasa Usaha			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.394.416.000,00	1.580.936.400,00	1.600.766.875,00
Retribusi Tempat Pelelangan	1.897.500.000,00	1.743.178.324,00	1.851.894.578,00
Retribusi Terminal	170.811.000,00	173.434.500,00	178.394.200,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	107.104.800,00	109.636.000,00	97.437.400,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	15.300.000,00	15.360.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	72.125.000,00	72.171.500,00	72.200.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00	10.365.000,00	10.072.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	681.853.200,00	786.238.500,00	827.735.200,00
Retribusi Siaran Iklan Radio Abirawa	35.000.000,00	40.492.273,00	31.944.000,00
	4.383.810.000,00	4.531.752.497,00	4.685.804.253,00
Retribusi Perizinan Tertentu			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.725.060.000,00	18.976.441.500,00	284.266.700,00
Retribusi Izin Trayek	17.830.000,00	22.015.000,00	21.070.000,00
Retribusi Izin Usaha	356.000.000,00	502.437.160,00	410.275.500,00
	8.098.890.000,00	19.500.893.660,00	715.612.200,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	23.668.317.250,00	35.812.498.970,00	16.303.639.041,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi daerah tahun 2013 lebih besar Rp12.144.181.720,00 atau 51,31%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi retribusi daerah tahun 2013 lebih besar Rp19.508.859.929,00 atau meningkat 119,66%.

Beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi tempat pelelangan. Untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mencapai target secara signifikan (terrealisasi 57%) hal ini disebabkan keterbatasan jumlah personil pemungut dalam melaksanakan pemungutan dan keterbatasan jumlah armada angkutan sampah.

Pendapatan retribusi sebagaimana tersebut di atas termasuk pendapatan tahun 2013 dan baru disetor tahun 2014 berada pada bendahara penerimaan SKPD berikut :



1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp1.932.000,00 terdiri dari : Retribusi Kebersihan pasar sebesar Rp302.000,00 dan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.630.000,00.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.095.750,00 merupakan pendapatan retribusi tempat rekreasi Pantai Sigandu dan Pantai Ujung Negro.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp65.690,00 merupakan pendapatan retribusi TPI Seklayu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp5.647.941.063,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank adalah sebagai berikut:

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal</i>			
Perusahaan Daerah Air Minum	1.900.000.000,00	2.588.632.747,00	1.784.188.086,00
Perusda Aneka Usaha	119.000.000,00	149.855.544,00	75.557.568,00
BPR/BKK Batang	586.000.000,00	614.989.334,00	407.547.314,00
Koperasi Serba Usaha Batang	1.630.000,00	1.630.000,00	1.086.000,00
Cemerlang Bank Jateng			
- Deviden Bank Jateng	2.292.833.438,00	2.292.833.438,00	1.297.056.043,00
-AMU Bank Jateng			1.802.000.000,00
	4.899.463.438,00	5.647.941.063,00	5.367.435.011,00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih besar Rp748.477.625,00 atau 15,28%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi tahun



2013 tersebut lebih besar Rp280.506.052,00 atau meningkat 5,23%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada tahun 2013.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah..... Rp61.709.068.248,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2013 sebesar Rp57.896.762.544,00 atau melebihi 16,64% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	356.500.000,00	444.545.342,00	307.891.500,00
Penerimaan Jasa Giro	1.208.234.476,00	1.482.472.537,00	1.693.460.502,00
Penerimaan Bunga Deposito	9.075.000.000,00	12.097.610.578,00	11.859.511.909,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	7.650.000,00	186.471.191,00	96.190.000,00
Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	82.717.749,00	732.752.751,00	114.840.580,00
Pendapatan Denda Retribusi	822.396.600,00	830.334.900,00	155.448.900,00
Pendapatan Dari Pengembalian	314.443.606,00	794.094.494,00	1.074.748.280,00
Pendapatan BLUD	37.767.158.000,00	45.140.786.455,00	30.500.503.854,00
Penerimaan lainnya			
	49.634.100.431,00	61.709.068.248,00	45.802.595.525,00

Dari tabel terlihat bahwa obyek pendapatan penyumbang terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp7.373.628.455,00. Sedangkan secara prosentase, obyek pendapatan yang melebihi anggaran terbesar adalah dari tuntutan ganti rugi daerah yaitu sebesar 2.337,53%.

Dari tabel dapat diketahui bahwa realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2013 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp15.906.472.723,00 atau sebesar 34,73%.

Berikut ini penjelasan masing-masing obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :



- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp444.545.342,00 terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai sebesar Rp31.500.000,00
 - b. Hasil penjualan drum bekas sebesar Rp16.010.000,00.
 - c. Hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp211.352.000,00.
 - d. Penjualan hasil pertanian sebesar Rp150.633.342,00.
 - e. Penjualan hasil perikanan sebesar Rp35.050.000,00
- 2) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.482.472.537,00 terdiri atas :
 - a. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp1.458.106.900,00.
 - b. Penerimaan Jasa Giro Bendahara sebesar Rp23.092.070,00.
 - c. Penerimaan Jasa Giro dari Bendahara Pengeluaran SKPD yang disetor bulan Januari 2014 sebesar Rp1.273.567,00
- 3) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp12.097.610.578,00 merupakan pendapatan dari penempatan kas daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana kas daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen kas daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (idle cash).
- 4) Penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp186.471.191,00 berasal dari:
 - a. Penerimaan dari kerugian uang daerah Rp183.562.100,00
 - b. Penerimaan dari kerugian barang daerah Rp2.909.091,00



- 5) Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp732.752.751,00 terdiri atas:
 - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp51.813.998,00
 - b. Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp309.326.906,00
 - c. Bidang Perhubungan dan Pariwisata sebesar Rp22.449.460,00
 - d. Bidang Kelautan Rp14.208.530,00
 - e. Bidang Pertanian Rp31.721.193,00
 - f. Bidang Kesehatan Rp226.459.203,00
 - g. Bidang Perdagangan Rp76.773.461,00
- 6) Pendapatan denda retribusi sebesar Rp830.334.900,00 terdiri atas :
 - a. Pendapatan denda retribusi perijinan tertentu sebesar Rp7.074.900,00
 - b. Pendapatan denda retribusi dari pelaporan pencatatan akte capil Rp823.260.000,00.
- 7) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp794.094.494,00 terdiri dari :
 - 1) Sisa pembebanan anggaran sebesar Rp244.164.038,00
 - 2) Pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman daerah kepada pihak ketiga berupa denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp5.666.200,00 terdiri dari pendapatan denda keterlambatan yang disetor di tahun 2013 sebesar Rp 5.622.200,00 dan pendapatan yang disetor tahun 2014 sebesar Rp44.000,00
 - 3) Lain-lain penerimaan sebesar Rp544.264.256,00
- 8) Pendapatan BLUD sebesar Rp45.140.786455.907,00 berasal dari :
 - a. Pendapatan jasa layanan sebesar Rp44.611.539.206,00.
 - b. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah Rp529.247.249,00.



2. PENDAPATAN TRANSFER.....Rp907.042.678.471,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan transfer lainnya serta Transfer Pemerintah Propinsi. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Pendapatan Transfer</i>			
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	727,325,187,522.00	727,548,569,854.00	677,708,142,613.00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	131,070,795,000.00	131,070,795,000.00	111,875,303,000.00
Transfer Pemerintah Provinsi	40,624,111,088.00	48,423,313,617.00	40,738,461,582.00
	899,020,093,610.00	907,042,678,471.00	830,321,907,195.00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan transfer tahun 2013 lebih tinggi Rp8.022.584.861,00 atau 0,89%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi tahun 2013 lebih besar Rp76.720.771.276,00 atau 9,24%.

Adapun penjelasan masing-masing pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Dana Perimbangan..... Rp727.548.569.854,00

Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</i>			
Dana Bagi Hasil Pajak	27,981,294,290.00	27,951,001,154.00	38,781,980,095.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7,887,823,232.00	8,141,498,700.00	7,014,223,518.00
Dana Alokasi Umum	641,663,630,000.00	641,663,630,000.00	577,238,039,000.00
Dana Alokasi Khusus	49,792,440,000.00	49,792,440,000.00	54,673,900,000.00
	727,325,187,522.00	727,548,569,854.00	677,708,142,613.00



Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan dana perimbangan tahun anggaran 2013 lebih besar Rp223.382.332,00 atau 0,03%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pendapatan dana perimbangan tahun 2012 lebih besar Rp49.840.427.241,00 atau meningkat 7,35%. Rincian obyek pendapatan dana perimbangan tahun 2013 yang tidak memenuhi target adalah dari dana bagi hasil pajak. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi dana bagi hasil pajak lebih kecil Rp10.830.978.941,00 atau kurang sebesar 27,93%.

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Dana Bagi Hasil PajakRp27.951.001.154,00

Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan 29 dan bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	18,132,519,725.00	19,424,642,197.00	29,101,717,220.00
Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	481,469,231.00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29	675,436,228.00	666,022,700.00	402,750,494.00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21	9,173,338,337.00	7,860,336,257.00	8,796,043,150.00
	27,981,294,290.00	27,951,001,154.00	38,781,980,095.00

Untuk tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak lagi menerima Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Hal ini dikarenakan untuk komponen pajak tersebut telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai unsur pendapatan asli daerah sejak tahun 2011. Sedangkan penerimaan di tahun 2012 hanya merupakan kekurangan alokasi dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Batang di tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun 2013 kurang Rp30.293.136,00 atau 0,11%. Hal ini disebabkan semua obyek



pendapatan dana perimbangan bagi hasil pajak tidak terealisasi sebagaimana yang telah dianggarkan. Dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pendapatan bagi hasil pajak tahun 2013 menurun sebesar Rp10.830.978.941 atau 27,93%. Penurunan terbesar dari dana bagi hasil pajak ini berasal dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dikarenakan sejak tahun 2013 ada pelimpahan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ke Pemerintah Kabupaten Batang.

b. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan PajakRp8.141.498.700,00

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:</i>			
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,044,283,030.00	1,064,508,841.00	1,022,027,211.00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	289,738,431.00	347,408,873.00	343,986,219.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	72,165,000.00	67,627,825.00	70,784,381.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	26,446,000.00	31,170,208.00	19,488,252.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	12,047,548.00	5,309,385.00	0.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	75,416,700.00	79,039,590.00	76,934,580.00
Bagi Hasil Cukai Tembakau	6,367,726,523.00	6,546,433,978.00	5,481,002,875.00
	7,887,823,232.00	8,141,498,700.00	7,014,223,518.00

Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2013 lebih tinggi Rp253.675.468,00 atau 3,22 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2013 lebih tinggi Rp1.127.275.182,00 atau 16,07%.

c. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)Rp641.663.630.000,00

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



Alokasi DAU tahun 2013 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, alokasi DAU untuk Kabupaten Batang adalah sebesar Rp641.663.630.000,00.

Alokasi DAU tahun anggaran 2013 untuk Kabupaten Batang telah diterima seluruhnya pada tahun anggaran 2013. Penerimaan DAU tahun 2013 ini lebih tinggi Rp64.425.591.000,00 dari penerimaan DAU tahun 2012 atau 11,16%.

d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)Rp49.792.440.000,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi DAK tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK/07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

Dana DAK untuk Kabupaten Batang meliputi 12(dua belas) bidang, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Alokasi Khusus:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
DAK Bidang Pendidikan	20,706,710,000.00	20,706,710,000.00	17,613,220,000.00
DAK Bidang Kesehatan	5,469,950,000.00	5,469,950,000.00	4,544,410,000.00
DAK Infrastruktur Jalan	4,288,550,000.00	4,288,550,000.00	6,474,400,000.00
DAK Infrastruktur Irigasi	5,169,370,000.00	5,169,370,000.00	5,957,990,000.00
DAK Infrastruktur Air Minum	1,080,860,000.00	1,080,860,000.00	1,673,790,000.00
DAK Infrastruktur Sanitasi	963,850,000.00	963,850,000.00	1,060,200,000.00
DAK Kelautan dan Perikanan	3,742,710,000.00	3,742,710,000.00	4,714,230,000.00
DAK Pertanian	4,506,110,000.00	4,506,110,000.00	4,619,770,000.00
DAK Lingkungan Hidup	1,253,480,000.00	1,253,480,000.00	1,100,820,000.00
DAK Keluarga Berencana	990,030,000.00	990,030,000.00	955,430,000.00
DAK Kehutanan	1,179,890,000.00	1,179,890,000.00	1,285,540,000.00
DAK Keselamatan dan Transportasi Darat	440,930,000.00	440,930,000.00	337,970,000.00
DAK Perdagangan Pasar			1,287,490,000.00
DAK Rujukan			3,048,640,000.00
Jumlah	49,792,440,000.00	49,792,440,000.00	54,673,900,000.00



Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012, maka realisasi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp4.881.460.000,- atau 8,93%. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Batang sudah tidak menerima lagi alokasi DAK Perdagangan Pasar dan DAK Rujukan.

e. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.....Rp131.070.795.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi 100% dari anggarannya yang terdiri atas pendapatan dana penyesuaian sertifikasi guru dan tunjangan kesejahteraan guru sebagai berikut:

- 1). Realisasi dana sertifikasi guru sebesar Rp126.573.945.000,00 dan
- 2). Realisasi tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp4.496.850.000,00.

f. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi Rp48.423.313.617,00

Pendapatan transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dengan perincian sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi:			
Bagi Hasil Pajak:			
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	9,342,519,492.00	10,064,706,594.00	9,611,451,563.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,557,018,149.00	15,838,219,968.00	14,347,052,053.00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13,577,223,431.00	17,117,913,325.00	16,659,678,415.00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	26,326,439.00	19,285,416.00	18,760,531.00
Kekurangan Dana Bagi Hasil 2012	5,121,023,577.00	5,383,188,314.00	0.00
	40,624,111,088.00	48,423,313,617.00	40,636,942,562.00
Bagi Hasil Lainnya:			
Sumbangan pihak ketiga			49,484,251.00
Bagi Hasil dari Alat - Alat Ukur dan Tera	-		28,771,936.00
Bagi Hasil Retribusi Perijinan Usaha Perikanan			23,262,833.00
			101,519,020.00
Jumlah	40,624,111,088.00	48,423,313,617.00	40,738,461,582.00



Bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi lebih besar Rp7.799.202.529,00.atau 19,20%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi tahun 2013 lebih tinggi Rp7.684.852.035,00 atau meningkat 18,86%.

Pada tahun 2013 ini, Dana Bagi Hasil Lainnya berupa bagi hasil sumbangan pihak ketiga, bagi hasil dari alat-alat ukur dan tera dan retribusi perijinan usaha perikanan tidak masuk lagi dalam kelompok pendapatan transfer pemerintah propinsi namun ke dalam kelompok bantuan keuangan dari propinsi.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH **Rp36.082.133.266,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer meliputi bantuan keuangan dari propinsi dengan realisasi tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah:</i>			
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Lainnya	36,802,896,000.00	36,082,133,266.00	18,901,700,000.00
Jumlah	36,802,896,000.00	36,082,133,266.00	18,901,700,000.00

Pendapatan lainnya sebesar Rp36.082.133.261,00 terdiri atas:

- Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah izin usaha perikanan sebesar Rp13.493.750,00
- Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari retribusi daerah tera dan tera ulang sebesar Rp11.736.516,00
- Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari sumbangan pihak ketiga kayu sebesar Rp14.307.000,00
- Belanja bantuan keuangan bersifat umum dari ijin usaha perkebunan sebesar Rp5.121.000,00
- FEDEP sebesar Rp85.000.000,00
- TMMD sebesar Rp310.000.000,00



- g. Penyusunan sistem informasi profil daerah sebesar Rp50.000.000,00
- h. Primatani sebesar Rp75.000.000,00
- i. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan dieng sebesar Rp150.000.000,00
- j. Pendidikan untuk semua (PUS) sebesar Rp50.000.000,00
- k. Bantuan sarana prasarana sebesar Rp21.410.000.000,00
- l. Bantuan pendidikan sebesar Rp13.907.475.000,00.

5.2.2 REALISASI BELANJA.....Rp1.031.360.905.401,00

Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2013 untuk masing-masing SKPD disajikan pada lampiran 11.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2013 serta realisasi tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

<i>Belanja Daerah:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	956.940.361.989,00	882.247.170.787,00	727.848.779.716,00
Belanja Modal	176.820.669.101,00	148.222.973.774,00	133.480.484.849,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	890.760.840,00	765.998.200,00
Transfer	39.436.050.000,00	36.051.769.800,00	38.109.770.600,00
	1.175.197.081.090,00	1.067.412.675.201,00	900.205.033.365,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2013 lebih rendah Rp107.784.405.889,00 atau 9,17%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi belanja tahun 2013 lebih besar Rp167.207.641.836,00 atau 18,57%.

Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

1. REALISASI BELANJA OPERASIRp882.247.170.787,00

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi



terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi:			
Belanja Pegawai	667.830.517.534,39	614.822.878.032,00	558.711.722.830,00
Belanja Barang	208.142.500.454,61	190.109.518.494,00	123.964.577.623,00
Belanja Bunga	358.236.000,00	62.958.879,00	82.530.764,00
Belanja Hibah	29.427.324.000,00	26.446.874.000,00	35.935.641.250,00
Belanja Bantuan Sosial	50.425.784.000,00	50.049.360.230,00	9.154.307.249,00
Belanja Bantuan Keuangan	756.000.000,00	755.581.152,00	-
	956.940.361.989,00	882.247.170.787,00	727.848.779.716,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi tahun 2013 lebih rendah Rp74.693.191.202,00 atau 7,81%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi belanja operasi tahun 2013 lebih besar Rp154.398.391.071,00 atau 21,22%.

a. Realisasi Belanja Pegawai..... Rp614.822.878.032,00

Belanja pegawai terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan rincian anggaran dan realisasi tahun anggaran 2013 sebagai berikut:



<i>Belanja Pegawai:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	425,664,518,476.00	418,442,804,803.00	98.30	(7,221,713,673.00)	(1.70)
Tambahan Penghasilan PNS	161,154,161,090.00	125,355,823,340.00	77.79	(35,798,337,750.00)	(22.21)
Belanja Lain Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2,668,000,000.00	2,668,000,000.00	100.00	-	-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1,181,928,000.00	1,181,927,863.00	100.00	(137.00)	(0.00)
	590,668,607,566.00	547,648,556,006.00	92.72	(43,020,051,560.00)	(7.28)
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	22,716,913,250.00	20,734,693,768.00	91.27	(1,982,219,482.00)	(8.73)
Honorarium Non PNS	32,389,885,476.39	26,154,202,708.00	80.75	(6,235,682,768.39)	(19.25)
Uang Lembur	1,823,788,000.00	1,534,440,750.00	84.13	(289,347,250.00)	(15.87)
Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	460,450,000.00	454,300,000.00	98.66	(6,150,000.00)	(1.34)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek	1,925,757,500.00	1,772,045,050.00	92.02	(153,712,450.00)	(7.98)
Belanja pegawai BLUD	17,845,115,742.00	16,524,639,750.00	92.60	(1,320,475,992.00)	(7.40)
	77,161,909,968.39	67,174,322,026.00	87.06	(9,987,587,942.39)	(12.94)
	667,830,517,534.39	614,822,878,032.00	92.06	(53,007,639,502.39)	(7.94)

b. Realisasi Belanja Barang.... Rp190.109.518.494,00

Anggaran dan realisasi belanja barang tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:



<i>Belanja Barang:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	14,008,792,893.00	13,308,408,226.00	95.00	(700,384,667.00)	(5.00)
Belanja Bahan/Material	28,254,038,982.41	26,983,606,772.00	95.50	(1,270,432,210.41)	(4.50)
Belanja Jasa Kantor	25,941,417,787.00	23,723,657,792.00	91.45	(2,217,759,995.00)	(8.55)
Belanja Premi Asuransi	1,516,000,000.00	725,074,400.00	47.83	(790,925,600.00)	(52.17)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,707,388,230.00	8,887,936,216.00	83.01	(1,819,452,014.00)	(16.99)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,669,042,933.00	8,039,945,699.00	92.74	(629,097,234.00)	(7.26)
Belanja Sewa	3,812,086,000.00	3,516,493,561.00	92.25	(295,592,439.00)	(7.75)
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					
Belanja Makan Minum	8,327,183,850.00	7,407,872,650.00	88.96	(919,311,200.00)	(11.04)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	2,537,852,740.00	2,456,552,215.00	96.80	(81,300,525.00)	(3.20)
Belanja Perjalanan Dinas	17,671,799,521.20	14,535,521,106.00	82.25	(3,136,278,415.20)	(17.75)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2,300,174,400.00	2,182,219,250.00	94.87	(117,955,150.00)	(5.13)
Belanja Pemeliharaan	38,567,998,648.00	35,934,980,223.00	93.17	(2,633,018,425.00)	(6.83)
Belanja Jasa konsultasi	5,427,650,000.00	5,063,143,325.00	93.28	(364,506,675.00)	(6.72)
Belanja Survey dan Penyusunan Design Engineering	378,906,000.00	363,654,800.00	95.97	(15,251,200.00)	(4.03)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	23,418,067,570.00	21,777,585,689.00	92.99	(1,640,481,881.00)	(7.01)
Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16,604,100,900.00	15,202,866,570.00	91.56	(1,401,234,330.00)	(8.44)
	208,142,500,454.61	190,109,518,494.00	91.34	(18,032,981,960.61)	(8.66)

c. Realisasi Belanja Bunga.....Rp62.958.879,00

Belanja bunga digunakan untuk membayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi bunga utang untuk tahun 2013 lebih rendah Rp295.277.121,00 atau 82,43%

d. Realisasi Belanja Hibah.... ..Rp26.446.874.000,00

Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan atau jasa dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dari yang dianggarkan sebesar Rp29.427.324.000,00 tidak terserap sebesar Rp2.968.450.000,00 atau 10,09%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun



2012 maka realisasi tahun 2013 lebih kecil Rp10.576.767.250,00 atau 29,43% dikarenakan pada tahun 2013, program Bantuan Percepatan Pembangunan Daerah (BP3D) tidak masuk dalam kelompok belanja hibah sebagaimana tahun 2012, namun masuk dalam bantuan sosial. Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2013 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2012 adalah sebagai berikut :

<i>Belanja Hibah:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
hibah kepada pemerintah desa	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
hibah kepada badan/lembaga/organisasi	24,503,124,000.00	22,700,174,000.00	9,825,157,000.00
hibah kepada kelompok /anggota masyarakat	3,824,200,000.00	2,646,700,000.00	26,110,484,250.00
	29,427,324,000.00	26,446,874,000.00	35,935,641,250.00

Belanja hibah tersebut belum termasuk realisasi belanja barang dan realisasi belanja modal dari SKPD yang dihibahkan kepada desa dan masyarakat.

Atas realisasi Belanja hibah pada SKPD pengampu yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp225.000.000,00 dicairkan pada akhir Tahun Anggaran 2013 dan diterima oleh penerima bantuan melewati TA 2013. Per 31 Desember 2013 tidak diketahui secara pasti realisasi belanja hibah yang senyatanya dan nilai saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran.

e. Realisasi Bantuan Sosial.....Rp 50.804.941.382,00

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada tahun 2013 realisasi bantuan sosial sebesar Rp50.804.941.382,00 lebih kecil Rp376.423.770,00 atau 0,75% dari anggarannya. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka realisasi belanja bantuan sosial naik sebesar Rp40.895.052.981,00 atau 546,73% sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini :



<i>Bantuan Sosial</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bant.sosial kpd kelompok masyarakat	34.005.800.000,00	33.689.396.000,00	8.398.726.097,00
Bant.sosial kpd anggota masyarakat	16.419.984.000,00	16.359.964.230,00	
Bant.sosial kpd partai politik		755.581.152,00	755.581.152,00
	50.425.784.000,00	50.804.941.382,00	9.154.307.249,00

- 1) Kenaikan terbesar realisasi bantuan sosial tahun 2013 dibanding tahun 2012 adalah karena masuknya program Bantuan Percepatan Pembangunan Daerah (BP3D) pada kelompok bantuan sosial yang pada tahun 2012 masuk pada kelompok belanja hibah.
- 2) Bantuan sosial kepada masyarakat meliputi bantuan pemugaran rumah tidak layak huni, bantuan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan bantuan program terpadu pemberdayaan masyarakat berprespektif gender.
- 3) Realisasi bantuan keuangan sebesar Rp755.581.152,00 atau terserap 99,94% dari anggarannya. Bantuan keuangan ini adalah untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Batang.

Atas realisasi Belanja Bantuan Sosial pada SKPD pengampu yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp1.441.500.000,00 dicairkan pada akhir Tahun Anggaran 2013 dan diterima oleh penerima bantuan melewati TA 2013. Per 31 Desember 2013 tidak diketahui secara pasti realisasi belanja bantuan sosial yang senyatanya dan nilai saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran.

2. REALISASI BELANJA MODALRp148.222.973.774,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Yang terdiri atas :



	Tahun 2013		Tahun 2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal:			
Belanja Tanah	602.000.000,00	587.065.800,00	3.011.698.550,00
Belanja Peralatan dan Mesin	43.396.965.710,00	36.424.978.584,00	34.414.713.846,00
Belanja Gedung dan Bangunan	75.062.348.792,00	59.684.602.403,00	61.530.138.417,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.722.993.749,00	48.759.821.697,00	29.874.695.825,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.013.720.000,00	682.813.600,00	3.915.692.300,00
Belanja Aset Lainnya	3.022.640.850,00	2.083.691.690,00	733.545.911,00
	176.820.669.101,00	148.222.973.774,00	133.480.484.849,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja modal tahun 2013 lebih rendah Rp28.597.695.327,00 atau 16,17%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi belanja modal tahun 2013 lebih besar Rp14.742.488.925,00 atau 11,05%.

Realisasi belanja modal sudah termasuk biaya administrasi perkantoran yang melekat pada biaya perolehan modal tersebut. Aset lainnya pada belanja modal merupakan belanja modal BLUD di RSUD Kabupaten Batang.

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja disajikan pada tabel berikut:



	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Modal Pengadaan Tanah	602,000,000	587,065,800	97.52	(14,934,200)	(2.48)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin:					
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	9,045,050,000	7,240,090,110	80.04	(1,804,959,890)	(19.96)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan	11,549,237,250	10,722,522,414	92.84	(826,714,836)	(7.16)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	118,000,000	117,995,285	100.00	(4,715)	(0.00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Dan Peternakan	80,000,000	79,530,000	99.41	(470,000)	(0.59)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor Rumah Tangga	9,496,386,435	9,092,048,433	95.74	(404,338,002)	(4.26)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	2,501,916,975	2,420,146,370	96.73	(81,770,605)	(3.27)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	90,670,000	87,976,350	97.03	(2,693,650)	(2.97)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	392,520,700	380,069,900	96.83	(12,450,800)	(3.17)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	5,659,400,150	5,587,977,572	98.74	(71,422,578)	(1.26)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	4,310,784,200	670,578,650	15.56	(3,640,205,550)	(84.44)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	153,000,000	26,043,500	17	(126,956,500)	(83)
	43,396,965,710	36,424,978,584	83.93	(6,971,987,126)	(16.07)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75,062,348,792	59,684,602,403	79.51	(15,377,746,389)	(20.49)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:					
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	29,372,912,700	26,984,260,381	91.87	(2,388,652,319)	(8.13)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4,135,959,549	3,186,879,400	77.05	(949,080,149)	(22.95)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15,317,664,500	14,263,250,055	93.12	(1,054,414,445)	(6.88)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	3,203,925,000	2,798,929,111	87.36	(404,995,889)	(12.64)
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	1,692,532,000	1,526,502,750	90.19	(166,029,250)	(9.81)
	53,722,993,749	48,759,821,697	90.76	(4,963,172,052)	(9.24)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:					
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	701,820,000	375,913,400	53.56	(325,906,600)	(46.44)
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	125,400,000	125,387,200	99.99	(12,800)	(0.01)
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	186,500,000	181,513,000	97.33	(4,987,000)	(2.67)
	1,013,720,000	682,813,600	67.36	(330,906,400)	(32.64)
Belanja Modal Aset Lainnya:	3,022,640,850	2,083,691,690	68.94	(938,949,160)	(31.06)
Jumlah Belanja Modal	176,820,669,101	148,222,973,774	83.83	(28,597,695,327)	(16.17)

3. REALISASI BELANJA TAK TERDUGARp890.760.840,00

Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.



Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp890.760.840,00 atau 44,54% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan tahun 2012 maka realisasi tahun 2013 naik sebesar Rp124.762.640,00 atau 16,29%. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:

- 1) Penanganan netralisir ranjau jangkar di Perairan Desa Kasepuhan Kec.Batang sebesar Rp114.928.640,00.
- 2) Penanganan bencana alam di Tropong, Desa Jolosekti Kec.Tulis sebesar Rp193.111.600,00.
- 3) Penanganan bencana alam di Gondang, Desa Donorejo Kec.Limpung sebesar Rp195.569.000,00.
- 4) Penanganan bencana alam di Pantek, Desa Banteng Kec.Tersono sebesar Rp195.225.800,00.
- 5) Penanganan bencana alam di Bibit, Desa Donorejo Kec.Limpung sebesar Rp191.925.800,00.

4. REALISASI BELANJA TRANSFER.....Rp36.051.769.800,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja transfer tahun 2013 lebih rendah Rp3.384.280.200,00 atau 9,16%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi tahun 2013 kurang Rp2.058.000.800,00 atau 5,40%.

Dalam penganggaran, belanja transfer masuk dalam belanja bantuan keuangan kepada desa. Realisasi belanja transfer dipergunakan untuk bantuan alokasi dana desa dan BPD, bantuan penyelenggaraan pilkades dan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa.

5.2.3 REALISASI PEMBIAYAAN.....Rp127.478.950.878,00

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran



pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2013 dan 2012 serta Pembiayaan Netto, adalah sebagai berikut:

<i>Pembiayaan:</i>	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan	132.531.957.261,00	132.532.413.822,00	106.757.242.134,00
2 Pengeluaran Pembiayaan	5.497.246.900,00	5.053.462.944,00	7.963.908.218,00
Pembiayaan Netto	127.034.710.361,00	127.478.950.878,00	98.793.333.916,00

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi pembiayaan netto tahun 2013 lebih tinggi Rp444.240.117,00 atau 0,35%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, realisasi pembiayaan netto 2013 lebih besar Rp28.685.616.962,00 atau 29,04%.

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan.....Rp132.532.413.822,00

Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a Penggunaan SILPA	132,531,957,261.00	132,531,957,261.00	103,934,094,134.00
b Pencairan dana cadangan			2,800,000,000.00
c Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
d Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		456,561.00	23,148,000.00
	132,531,957,261.00	132,532,413,822.00	106,757,242,134.00

- a. Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2012 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2013. Jumlah tersebut



telah ditetapkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

- b. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp456.561,00 berasal dari penerimaan piutang dari sdr. Eko Saputro sebesar Rp 400.000,00 dan Sutomo sebesar Rp56.561,00.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....Rp5.053.462.944,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran kas daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

	2013		2012
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Pengeluaran Pembiayaan:</i>			
a Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah	1,797,000,000.00	1,797,000,000.00	6,298,000,000.00
b Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Pemerintah Pusat	162,507,000.00	162,506,562.00	162,506,562.00
c Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri-Lainnya	3,537,739,900.00	3,093,956,382.00	1,503,401,656.00
	5,497,246,900.00	5,053,462,944.00	7,963,908,218.00

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp1.797.000.000,00 terdiri atas:
- 1) Penambahan penyertaan modal pada Bank BPD Jateng sebesar Rp1.097.000.000,00.
 - 2) Penambahan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Batang sebesar Rp700.000.000,00.
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan angsuran pinjaman SLA-860/DP3/1996 Pemerintah Daerah kepada Asian Development Bank sebesar Rp162.506.562,00



- c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya merupakan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp3.093.956.382,00 berupa jaminan pemeliharaan atas kegiatan kontrak pembangunan di tahun 2012 dimana pemeliharannya dilaksanakan di tahun 2013, antara lain berupa pembangunan gedung kantor, pemeliharaan jalan, rehab berat pasar dan lain-lain.

5.2.4 REALISASI SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN.....Rp146.693.658.753,00

	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	2012(Rp)
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1,048,162,370,729.00	1,086,627,383,076.00	933,943,656,710.00
Belanja dan Transfer	1,175,197,081,090.00	1,067,412,675,201.00	900,205,033,365.00
Surplus/(Defisit)	(127,034,710,361.00)	19,214,707,875.00	33,738,623,345.00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	132,531,957,261.00	132,532,413,822.00	106,757,242,134.00
Pengeluaran Pembiayaan	5,497,246,900.00	5,053,462,944.00	7,963,908,218.00
Pembiayaan Netto	127,034,710,361.00	127,478,950,878.00	98,793,333,916.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	146,693,658,753.00	132,531,957,261.00

Berdasarkan perhitungan pada laporan realisasi anggaran terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp146.693.658.753,00, yang terdiri dari:

1. Rekening Kas di BUD/rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp48.783.743.770,00 sama dengan posisi saldo kas di Buku Kas Umum Daerah (BIX) per 31 Desember 2013.
2. Deposito Pemerintah kabupaten Batang sebesar Rp 86.000.000.000,00 yang berada pada :
 - a. Bank Jateng Cabang Batang sebesar Rp60.000.000.000,00
 - b. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Batang sebesar Rp25.000.000.000,00
 - c. Deposito pada Bank Tabungan Negara Pembantu Batang sebesar Rp1.000.000.000,00



3. Kas Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Rp570.707.044,00
4. Kas Bendahara Penerimaan SKPD se-Kabupaten Batang sebesar Rp65.672.451,00
5. Kas di BLUD RSUD Kabupaten Batang sebesar Rp11.273.535.488,00.
Posisi Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2013 terdiri dari :
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebesar Rp11.038.114.588,00
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD sebesar Rp235.420.900,00.



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun dan 2013 dan 2012, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran.

Penyajian laporan arus kas didasarkan pada transaksi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh RSUD Batang sebagai BLUD. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pada kas BLUD RSUD Batang menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan.

Ringkasan laporan arus kas tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	166,993,136,307.00	166,911,216,694.00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(147,778,428,432.00)	(133,172,593,349.00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(5,053,006,383.00)	(5,140,760,218.00)
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(463,948,856.00)	105,882,494.00
Kenaikan/Penurunan Kas	13,697,752,636.00	28,703,745,621.00
Saldo Awal Kas Daerah	132,359,526,622.00	103,655,781,001.00
Saldo Akhir Kas Daerah	146,057,279,258.00	132,359,526,622.00
Saldo pada Bendahara Pengeluaran	816,667,356.00	590,856,641.00
Saldo pada Bendahara Penerimaan	65,672,451.00	49,824,142.00
	146,939,619,065.00	133,000,207,405.00

5.3.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI.....Rp 166.993.136.307,00

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	1,086,182,837,734.00	933,635,765,210.00
2 Arus Keluar Kas	919,189,701,427.00	766,724,548,516.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	166,993,136,307.00	166,911,216,694.00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas OperasiRp 1.086.182.837.734,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	40,333,063,058.00	17,246,379,938.00
Pendapatan Retribusi Daerah	35,812,498,970.00	16,303,639,041.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,647,941,063.00	5,367,435,011.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61,264,522,906.00	45,494,704,025.00
Dana Bagi Hasil Pajak	27,951,001,154.00	38,781,980,095.00
Bagi Hasil Bukan Pajak	8,141,498,700.00	7,014,223,518.00
Dana Alokasi Umum	641,663,630,000.00	577,238,039,000.00
Dana Alokasi Khusus	49,792,440,000.00	54,673,900,000.00
Dana Otonomi Khusus	131,070,795,000.00	111,875,303,000.00
Dana Penyesuaian	48,423,313,617.00	40,636,942,562.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	101,519,020.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	36,082,133,266.00	18,901,700,000.00
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1,086,182,837,734.00	933,635,765,210.00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....Rp 919.189.701.427,00

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Belanja Pegawai	614,822,878,032.00	558,711,722,830.00
Belanja Barang dan Jasa	190,109,518,494.00	123,964,577,623.00
Bunga	62,958,879.00	82,530,764.00
Subsidi	-	-
Belanja Hibah	26,446,874,000.00	35,935,641,250.00
Belanja Bantuan Sosial	50,804,941,382.00	9,154,307,249.00
Belanja Tidak Terduga	890,760,840.00	765,998,200.00
Bagi Hasil Pajak	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Belanja transfer/bagi hasil ke desa	36,051,769,800.00	38,109,770,600.00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	919,189,701,427.00	766,724,548,516.00

5.3.2 ARUS KAS DARI INVESTASI ASET

NON KEUANGAN.....(Rp 147.778.428.432,00)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

	2013 (Rp)	2012(Rp)
Arus Masuk Kas	444,545,342.00	307,891,500.00
Arus Keluar Kas	148,222,973,774.00	133,480,484,849.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(147,778,428,432.00)	(133,172,593,349.00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan....Rp444.545.342,00

Arus kas masuk berasal dari penerimaan yang bersumber pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
<i>Pelepasan Hak Atas Tanah</i>	-	-
<i>Penjualan atas Peralatan dan Mesin:</i>		
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	-	-
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	-	-
<i>Penjualan Aset Tetap Lainnya:</i>		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	31,500,000.00	
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	-	
Penjualan Drum Bekas	16,010,000.00	21,290,000.00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	211,352,000.00	159,204,000.00
Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas		
Penjualan hasil pertanian	150,633,342.00	106,350,000.00
Penjualan hasil perkebunan	-	
Penjualan hasil peternakan	-	
Penjualan hasil perikanan	35,050,000.00	21,047,500.00
	444,545,342.00	307,891,500.00
Arus Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	444,545,342.00	307,891,500.00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan..... Rp148.222.973.774,00

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas:

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Belanja Tanah	587,065,800.00	3,011,698,550.00
Belanja Peralatan dan Mesin	36,424,978,584.00	34,414,713,846.00
Belanja Bangunan dan Gedung	59,684,602,403.00	61,530,138,417.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,759,821,697.00	29,874,695,825.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	682,813,600.00	3,915,692,300.00
Belanja Aset Lainnya	2,083,691,690.00	733,545,911.00
Arus Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	148,222,973,774.00	133,480,484,849.00

Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut.



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Belanja Pengadaan Tanah	587,065,800.00	3,011,698,550.00
Alat -Alat Berat	7,240,090,110.00	4,452,050,000
Alat -Alat Angkutan	10,722,522,414.00	9,657,502,750.00
Alat -alat Bengkel	117,995,285.00	150,399,860.00
Alat -alat Pertanian dan Peternakan	79,530,000.00	-
Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga	9,092,048,433.00	9,072,078,866.00
Alat -alat Studio	2,420,146,370.00	863,884,618.00
Alat -alat Komunikasi	87,976,350.00	25,701,500.00
Alat -alat Ukur	380,069,900.00	88,609,182.00
Alat -alat Kedokteran	5,587,977,572.00	3,021,685,270.00
Alat -alat Laboratorium	670,578,650.00	7,082,801,800.00
Alat -alat Keamanan	26,043,500.00	-
Konstruksi Jalan	26,984,260,381.00	12,617,203,285.00
Konstruksi Jembatan	3,186,879,400.00	1,624,456,860.00
Konstruksi Jaringan Air	14,263,250,055.00	13,349,055,338.00
Penerangan, Taman dan Hutan Kota	2,798,929,111.00	183,359,500.00
Instalasi Listrik dan Telpo	1,526,502,750.00	2,100,620,842.00
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	59,684,602,403.00	61,530,138,417.00
Buku/ Kepustakaan	375,913,400.00	3,746,546,400.00
Barang Bercorak Seni, Kebudayaan	125,387,200.00	69,595,900.00
Hewan/ Ternak dan Tanaman	181,513,000.00	99,550,000.00
Rambu Peringatan	-	-
Belanja Aset Lainnya	2,083,691,690.00	733,545,911.00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	148,222,973,774.00	133,480,484,849.00

5.3.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN.....(Rp5.053.006.383,00)

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	456.561,00	2.823.148.000,00
2 Arus Keluar Kas	5.053.462.944,00	7.963.908.218,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(5.053.006.383,00)	(5.140.760.218,00)

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....Rp456.561,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Pembiayaan pada tahun anggaran 2013 terdiri atas:



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	2,800,000,000.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Entitas Lainnya	456,561.00	23,148,000.00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	456,561.00	2,823,148,000.00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan.....(Rp5.053.462.944,00)

Arus keluar kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas rincian sebagai berikut:

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,797,000,000.00	6,298,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	162,506,562.00	162,506,562.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	3,093,956,382.00	1,503,401,656.00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	5,053,462,944.00	7,963,908,218.00

5.3.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN....(Rp463.948.856,00)

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktiva non anggaran terdiri dari penerimaan PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun lalu yang merupakan realisasi kas masuk akibat aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang periode 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan Arus keluar kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari pengeluaran PFK dan penerimaan sisa uang persediaan tahun berjalan.

Arus kas dari aktivitas non anggaran yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD RSUD Batang.



	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	46,295,678,617.00	47,560,866,858.00
2 Arus Keluar Kas	46,759,627,473.00	47,454,984,364.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(463,948,856.00)	105,882,494.00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non AnggaranRp46.295.678.617,00

Rincian arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran adalah sebagai berikut:

<i>Arus Masuk Kas Aktivitas NonAnggaran</i>	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1. <i>Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>		
Iuran Wajib Pegawai 10%	31.556.506.279,00	30.204.319.094,00
Taperum	722.057.000,00	748.049.983,00
Subsidi Askes	6.320.223.698,00	6.048.452.754,00
Pajak Penghasilan Ps 21	7.511.038.351,00	10.272.357.956,00
Askes 2% Gaji Terusan	8.922.442,00	7.588.938,00
PPh 21 yang belum disetor oleh BLUD RSUD Kab.Batang per 31 Desember	-	1.785.000,00
PFK Dinsosnakertran yang belum disetorkan ke Kasda	2.715.208,00	
2. <i>Penerimaan Sisa UP Tahun lalu</i>		
Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2012	737.563,00	23.235.202,00
Pengembalian Belanja yang belum disetor per 31 Desember 2012	173.478.076,00	255.077.931,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	46.295.678.617,00	47.560.866.858,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran.....Rp46.759.627.473,00

Arus keluar kas aktivitas non anggaran terdiri atas rincian sebagai berikut:



<i>Arus Keluar Kas Aktivitas Non Anggaran</i>	2013 (Rp)	2012 (Rp)
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Iuran Wajib Pegawai 10%	31,556,506,279.00	30,204,319,094.00
Taperum	722,057,000.00	748,049,983.00
Subsidi Askes	6,320,223,698.00	6,048,452,754.00
Pajak Penghasilan Ps 21	7,511,038,351.00	10,272,357,956.00
Askes 2% Gaji Terusan	8,922,442.00	7,588,938.00
PFK Dinsosnakertrans yang belum disetor sd 31 Desember 2013	2,715,208.00	
PPh 21 yang belum disetor oleh BLUD RSUD Kab.Batang per 31 Desember	1,785,000.00	-
2. Pengeluaran Sisa UP Tahun Berjalan		
Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember	30,315.00	737,563.00
Pengembalian Belanja SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2013	570,676,729.00	173,478,076.00
Pendapatan SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2013	65,672,451.00	-
	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	46,759,627,473.00	47,454,984,364.00

PFK tersebut tidak termasuk potongan pajak SP2D LS Non Gaji yang di pungut dan disetor oleh bendahara pengeluaran SKPD. SP2D LS Non Gaji yang diterbitkan masih diberikan bruto (termasuk pajak yang harus dipotong). Pajak belanja LS non Gaji tidak dipotong lewat SP2D tetapi sebagai informasi.

5.3.5 SALDO AKHIR KAS..... **Rp 146.939.619.065,00**

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

	2013 (Rp)	2012 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah	132,359,526,622.00	103,655,781,001.00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	13,697,752,636.00	28,703,745,621.00
Saldo Akhir Kas Daerah	146,057,279,258.00	132,359,526,622.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	816,667,356.00	590,856,641.00
Kas di Bendahara Penerimaan	65,672,451.00	49,824,142.00
Saldo Akhir Kas	146,939,619,065.00	133,000,207,405.00

Saldo akhir kas per 31 Desember 2013 terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas RSUD Batang, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Bendahara Penerimaan, dengan rincian sebagai berikut:



Kas di Kas Daerah:		
Kas di Kas Daerah	134,783,743,770.00	
Kas di RSUD Batang	<u>11,273,535,488.00</u>	146,057,279,258.00
Kas di Bendahara Penerimaan:		
Pendapatan Asli Daerah	<u>65,672,451.00</u>	65,672,451.00
Kas di Bendahara Pengeluaran:		
Sisa Uang Persediaan Tahun 2013	30,315.00	
Sisa belanja yang belum disetor	568,860,638.00	
Sisa kas SKPD yang bukan merupakan Jasa Giro	542,524.00	
Jasa Giro yang belum disetor	1,273,567.00	
Hutang Belanja dan Hutang PFK	<u>245,960,312.00</u>	
		<u>816,667,356.00</u>
Saldo Akhir Kas		<u>146,939,619,065.00</u>

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013:

1. Saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp132.531.957.261,00. Saldo tersebut telah diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA tahun 2013.
2. Tidak terdapat selisih antara saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2013 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada LRA 2013 yakni sebesar Rp146.693.658.753,00.
3. Saldo akhir kas di LAK dan Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp146.939.619.065,00 sedangkan SILPA di Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp146.693.658.753,00. Selisih antara saldo kas dengan saldo SILPA adalah kas pada SKPD dan BUD yang bukan bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah. Selisih sebesar Rp245.960.312,00 tersebut adalah sebagai berikut:



	Rp
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2013	146,939,619,065.00
Saldo SILPA di Neraca per 31 Desember 2013	146,693,658,753.00
Selisih	<u>245,960,312.00</u>
Kas yang bukan bagian SILPA:	
Kas di Kas Daerah :	-
Kas di Kas BLUD:	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-
Kas di Bendahara Pengeluaran:	
Hutang Belanja dan Hutang Pajak	245,960,312.00
	<u>245,960,312.00</u>
Kas di Bendahara Penerimaan	
Pendapatan belum disetor	-
	<u>-</u>
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA	<u><u>245,960,312.00</u></u>



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA.

Pada Tahun Anggaran 2013 ini, Kabupaten Batang mendapatkan total anggaran Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama sebesar Rp52.656.465.000,00 melalui 8 (delapan) SKPD Pengelola/Pelaksana, dan sampai dengan 31 Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp45.794.246.152,00 atau 86,97% sebagaimana tabel berikut :

NO	SKPD	TUGAS PEMBANTUAN			URUSAN BERSAMA		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1,110,000,000	1,093,882,230	98.55	-	-	-
2	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,049,581,000	1,017,676,922	96.96	-	-	-
3	DINAS KESEHATAN	3,101,580,000	2,879,387,200	92.84	-	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	6,000,000,000	5,866,838,800	97.78	-	-	-
5	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	227,660,000	218,843,600	96.13	-	-	-
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	7,500,000,000	1,059,865,500	14.13	-	-	-
7	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	3,147,500,000	3,147,500,000	100
8	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	30,520,144,000	30,510,251,900	99.97
JUMLAH		18,988,821,000	12,136,494,252	63.91	33,667,644,000	33,657,751,900	100

A. Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun anggaran 2013 ini, Kabupaten Batang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp18.988.821.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.136.494.252,00 atau 63.91%. Dana Tugas Pembantuan tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana tabel dibawah ini :



NO	SKPD	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan			
		Peningkatan Produksi, Produktivitas & Mutu Tanaman Florikultura Berkelanjutan	1,000,000,000	987,300,000	98.73
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	110,000,000	106,582,230	96.89
		Jumlah	1,110,000,000	1,093,882,230	98.55
2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1,049,581,000	1,017,676,922	96.96
		Jumlah	1,049,581,000	1,017,676,922	96.96
3	Dinas Kesehatan	1 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1,833,150,000	1,819,558,400	99.26
		2 Program Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan	1,268,430,000	1,059,828,800	83.55
		Jumlah	3,101,580,000	2,879,387,200	92.84
4	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1 Program Pembinaan Upaya Kesehatan	6,000,000,000	5,866,838,800	97.78
		Jumlah	6,000,000,000	5,866,838,800	97.78
5	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani/Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (FEATI)	227,660,000	218,843,600	96.13
		Jumlah	227,660,000	218,843,600	96.13
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1 Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	7,500,000,000	1,059,865,500	14.13
		Jumlah	7,500,000,000	1,059,865,500	14.13
JUMLAH TOTAL			18,988,821,000	12,136,494,252	63.91

B. Dana Urusan Bersama

Anggaran Dana Urusan Bersama Kabupaten Batang Tahun 2013 sebesar Rp30.520.144.000,-, telah terealisasi sebesar Rp30.510.251.900,00 atau 99,97%. Dana tersebut dilaksanakan melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM sebesar Rp3.147.500.000,00 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp27.372.644.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini :



No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM	3.147.500.000	3.147.500.000	100,00
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.372.644.000	27.362.751.900	99,96
Jumlah		30.520.144.000	30.510.251.900	99,97

Adapun penjelasan lebih rincinya sebagai berikut :

a. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM

Tahun Anggaran 2013 ini, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama Rp3.147.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.147.500.000,-00 atau 100%, diperuntukkan bagi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Batang sesuai dengan DIPA nomor DIPA-033-05.5.503036/2013 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, sebagaimana tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Batang	3.147.500.000	3.147.500.000	100
JUMLAH		3.147.500.000	3.147.500.000	100

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggaran Dana Urusan Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp27.372.644.000,- sesuai DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri nomor DIPA-010.05.5.039470/2013. Anggaran tersebut digunakan untuk Program



Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dan terealisasi sebesar Rp27.362.751.900,00 atau 99,96%, sebagaimana tabel berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	27.372.644.000	27.362.751.900	99,96
JUMLAH		27.372.644.000	27.362.751.900	99,96

6.2 PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah dana bantuan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.



Penggunaan dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.

Sasaran Program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh Provinsi di Indonesia.

Alokasi Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD/SDLB : Rp. 580.000,- /siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 710.000,- /siswa/tahun

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember melalui Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KASDA) Provinsi kemudian baru disalurkan ke masing-masing rekening sekolah.

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Tahun 2013, Dana BOS dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan ; digunakan untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, pengembangan database perpustakaan serta pemeliharaan perabot perpustakaan (Minimal penggunaan adalah 5 % dari dan BOS).
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu meliputi: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (misalnya konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran
3. Kegiatan Pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, PAKEM (SD), Pembelajaran Konstektual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial,



pembelajaran pengayaan, pematapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

4. Pembiayaan dalam rangka Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Sekolah termasuk untuk fotocopy , penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet termasuk untuk pemasangan baru. Untuk membeli genset atau jenis lainnya seperti panel tenaga surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik. Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan.
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), Pegawai perpustakaan, Penjaga Sekolah, Satpam dan Pegawai kebersihan. Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.
9. Pengembangan Profesi Guru seperti KKG/MGMP dan KKKS/MKKS, pembiayaan untuk menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan



mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/blockgrant tersebut.

10. Pemberian bantuan siswa miskin seperti pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis dapat untuk membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll). Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
12. Pembelian perangkat komputer seperti desktop/work station dan printer atau printer plus scanner. Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah.
13. Bila seluruh komponen 1 s/d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan meja kursi siswa jika meja kursi yang ada sudah rusak berat. Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.

Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.

Adapun Realisasi penggunaan dana BOS baik jenjang SD maupun SMP adalah sebagai berikut :



1.	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Rp.	1.796.190.000,00
2.	Keg. Penerimaan Siswa baru	Rp.	528.170.000,00
3.	Kegiatan Ekstra kurikuler	Rp.	6.693.651.000,00
4.	Kegiatan Ujian dan Ulangan Umum	Rp.	7.901.575.000,00
5.	Pembelian bahan habis pakai	Rp.	7.663.110.000,00
6.	Langganan daya dan jasa	Rp.	1.771.620.000,00
7.	Pembiayaan perawatan sekolah	Rp.	3.427.319.000,00
8.	Honorarium guru honorer	Rp.	8.637.090.000,00
9.	Pengembangan Profesi guru	Rp.	2.239.991.000,00
10.	Membantu siswa miskin	Rp.	372.013.000,00
11.	Pembiayaan Pengelolaan BOS	Rp.	619.991.000,00
12.	Pembelian Perangkat komputer	Rp.	2.523.847.000,00
13.	Pembelian Perangkat lain	<u>Rp.</u>	<u>4.933.307.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	49.107.874.000,00

Sedangkan sisa penggunaan dana BOS Tahun 2013 sebesar Rp5.894.237.000,00 ada direkening/kas masing-masing bendahara BOS sekolah.

Sedangkan Dana Block Grant sebesar Rp8.270.373.400,00 digunakan untuk :

a.	Rehabilitasi ruang kelas jenjang SD (35 ruang)	Rp.	1.242.295.000,00
b.	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (7 ruang)	Rp.	786.430.400,00
c.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (2 ruang)	Rp.	206.400.000,00
d.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA(12 ruang)	Rp.	1.798.248.000,00
e.	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (10 ruang)	Rp.	1.355.000.000,00
f.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (1 paket)	Rp.	1.492.000.000,00
g.	Pembangunan komunitas Pondok Pesantren	Rp.	750.000.000,00
h.	Perakitan TIK	Rp.	640.000.000,00

Untuk dana Block Grant sudah dilaksanakan fisik dan keuangan sebesar 100%.



BAB VI

PENUTUP

Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Kabupaten Batang ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2013 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2013. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2013. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2014

BUPATI BATANG

YOYOK RIYO SUDIBYO